



SNV

**INTERNATIONAL
FOOD POLICY
RESEARCH
INSTITUTE
IFPRI**



Studi Rantai Pasok Sanitasi

Kunci Pencapaian Target

STOP Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

Voice for Change Partnership

Dokumen ini dipublikasikan oleh SNV dengan dibantu oleh LP2M dan PKBI Sumatera Barat sebagai Organisasi Masyarakat Sipil di Lampung dalam program Voice for Change Partnership (V4CP) yang dibiayai oleh Kementerian luar negeri, Pemerintah Belanda. Melalui program ini, SNV mendukung Organisasi Masyarakat Sipil untuk dapat mendorong kolaborasi di antara pemangku kebijakan yang relevan, mempengaruhi penetapan agenda, dan mendukung program pemerintah dan sektor swasta, serta mengawal implementasi hal tersebut. Program ini di Indonesia fokus kepada dua topik utama yaitu air, sanitasi, dan perilaku hidup bersih (WASH) dan ketahanan pangan dan gizi. Riset ini dilakukan dalam rangka menyiapkan bukti untuk kegiatan advokasi tersebut.

Studi Rantai Pasok Sanitasi
Kunci Pencapaian Target
STOP Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

Disusun oleh:

Wash in Southeast Asia (Wise)
SNV

Dipersiapkan untuk:

Voice for Change Partnership (V4CP) Programme

Oktober 2017



Ringkasan Eksekutif

Di Indonesia, sebanyak 11,8% rumah tangga masih belum memiliki akses sarana sanitasi yang layak. Sebanyak 24,2% rumah tangga belum memiliki akses terhadap sarana sanitasi yang layak di Sumatera Barat. Oleh karena itu, pemerintah telah berusaha menerapkan program “Sanitasi Total Berbasis Masyarakat” (STBM) di seluruh Indonesia sejak tahun 2006. Program STBM ini bertujuan dalam hal pencapaian target nasional 100% di bidang sanitasi pada tahun 2019, serta mendukung Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 6 mengenai air bersih dan sanitasi.

Pada tahun 2016, **SNV Netherlands Development Organization** meluncurkan program kemitraan *Voice for Change Partnership* (V4CP) di enam negara, termasuk Indonesia. Program V4CP tersebut sejalan dan mendukung program nasional pemerintah yaitu STBM. SNV memulai Program V4CP di empat lokasi di Sumatera Barat dan Lampung, yaitu Padang Pariaman, Sijunjung, Pringsewu, dan Lampung Selatan. Sebagai bagian dari Program V4CP dan untuk menyediakan bukti serta data dalam mendukung kegiatan advokasi yang dilakukan Civil Society Organizations/Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) terkait sanitasi, maka SNV mengadakan penelitian mengenai pemasokan (*supply*) dan permintaan (*demand*) produk dan layanan sanitasi di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami persediaan dan permintaan produk dan layanan sanitasi di Kabupaten Padang Pariaman dan Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Analisis ini melibatkan tiga perspektif penting yang diperlukan untuk meningkatkan akses terhadap sanitasi, yaitu permintaan akan produk dan layanan sanitasi dari konsumen yang ada dan yang potensial, kemampuan organisasi dan individu untuk memicu, mewujudkan, dan melayani permintaan akan produk dan layanan sanitasi serta mengidentifikasi apakah terdapat dukungan lingkungan yang mendukung atau menghambat permintaan akan pasokan sanitasi.

Metodologi

Kerangka penelitian studi ini mengacu pada metodologi MIT *Comprehensive Initiative on Technology Evaluation (CITE) 3-S* (*suitability, sustainability dan scalability*) untuk evaluasi produk yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu sanitasi. Fokus utama untuk rantai pasok sanitasi analisis ini adalah aspek skalabilitas (*scalability*). Hal ini terutama untuk menjawab apakah produk sanitasi dapat mencapai konsumen secara efektif atau tidak. Selanjutnya, pertanyaan spesifik dirumuskan berdasarkan kriteria skalabilitas, dengan pertanyaan tambahan untuk mengetahui kesesuaian dari produk dan layanan, permintaan pelanggan akan sanitasi, peran lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat, yang mendukung permintaan pelanggan dan aktor rantai pasokan, dan keberlanjutan dari sistem rantai pasok sanitasi ini.

Penelitian lapangan dilakukan di Padang Pariaman pada 15-17 Oktober 2017, dan di Sijunjung 12-14 Oktober 2017. Kegiatan awal dilakukan dengan mengadakan diskusi kelompok dengan empat kelompok konsumen (pria yang menggunakan jamban, wanita yang menggunakan jamban, pria yang tidak menggunakan, dan wanita yang tidak menggunakan jamban) di setiap desa, serta wawancara individu dengan perwakilan pelaku rantai pasokan, lembaga keuangan, dan instansi pemerintah selama tiga hari di setiap lokasi.

Hasil Penelitian dan Diskusi

Di bawah ini merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan pada masyarakat konsumen, aktor rantai sanitasi dan lembaga keuangan serta pemerintah:

Masyarakat

- Masyarakat konsumen di Kabupaten Sijunjung dan Padang Pariaman memiliki pemahaman tentang BABS dan mau memiliki jamban pribadi namun prioritas pembangunan jamban masih tergolong rendah.
- Berdasarkan hasil diskusi dengan warga secara umum, pengetahuan akan tangki septik masih cenderung kurang. Warga menganggap tangki septik yang baik ber dinding bata, memiliki tutup dan ventilasi cukup, tetapi dasarnya tanah.
- Adapun kendala dalam pembangunan jamban di rumah tangga diantaranya: biaya pembangunan dan tukang yang cukup mahal, pembangunan jamban bukan menjadi prioritas, menunggu sampai pembangunan rumah selesai, sulit akses air, lokasi atau area rumah tinggal yang tidak rata (berada di tebing atau wilayah pegunungan terjal)
- Inisiatif pemerintah Kabupaten Sijunjung dan warga dalam pengadaan jamban dengan menggunakan skema arisan jamban sudah ada, dan saat ini terus digalakkan. Untuk Kabupaten Padang Pariaman, masih harus terus disosialisasikan karena belum ada di kedua nagari tersebut.
- Warga pernah mendengar atau tahu tentang lembaga keuangan yang dapat meminjamkan uang. Namun, ada kecenderungan warga enggan meminjam ke lembaga keuangan karena harus membayar bunga sedangkan pemasukan per bulannya tidak stabil. Akibatnya warga juga cenderung enggan meminjam dari institusi keuangan seperti koperasi karena ragu dapat membayar pinjaman pada waktu yang ditentukan. Perlu ada opsi produk pinjaman dalam jangka panjang yang lebih memudahkan warga untuk membayar dalam periode yang lebih lama.
- Lembaga keuangan seperti Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) dan BPR belum memprioritaskan wirausaha sanitasi. Prioritas diberikan untuk bidang pertanian, peternakan dan perdagangan (usaha mikro kecil menengah). Masih sedikitnya produk pinjaman sanitasi ini dapat disebabkan oleh sedikitnya permintaan pembangunan jamban dari konsumen. Untuk itu perlu dimunculkan urgensi masyarakat untuk mempunyai jamban pribadi. Jika ada kenaikan permintaan, produk-produk pinjaman dan juga usaha sanitasi dapat berkembang dengan lebih baik.

Aktor Rantai Sanitasi

- Aktor rantai sanitasi yaitu toko-toko bangunan tidak mengalami kesulitan berarti dalam penyediaan produk sanitasi. Namun demikian dukungan untuk pemasok material dalam nagari perlu diberikan. Aktor rantai sanitasi seperti tukang dan pengusaha sanitasi skala nagari atau kecamatan tidak memiliki akses leluasa terhadap lembaga keuangan besar seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau Bank Nagari.
- Aktor rantai sanitasi tidak secara teknis terlihat sebagai UMKM mandiri. Usaha sanitasi biasanya termasuk dalam UMKM jenis usaha konstruksi. Hal ini menyebabkan UMKM tersebut tidak menjadi prioritas dalam binaan dinas terkait.
- Aktor rantai sanitasi saat ini, tidak melayani pelayanan purna-jual, seperti perbaikan jika jamban rusak, dan pelayanan penyedotan jamban.

Lembaga Keuangan

- Institusi keuangan tidak menyediakan skema pinjaman untuk sanitasi.
- Institusi keuangan skala mikro atau KMN dan bank, baik bank BRI dan Bank Nagari, belum memiliki prioritas untuk memberikan pinjaman terkait sanitasi. BUM Nag serta BPR juga tidak memprioritaskan wirausaha sanitasi karena belum melihat permintaan masyarakat yang tinggi akan sarana sanitasi sehingga khawatir pengembalian pinjaman macet.
- Belum ada kerja sama antara pemerintah dan lembaga keuangan dalam skema pinjaman sanitasi.
- Institusi keuangan skala nagari membutuhkan pelatihan dan pendampingan pemerintah mengenai manajemen keuangan dan kredit lembaga mikro kredit.

Lembaga Pemerintah

- Tenaga sanitarian kurang karena jangkauan wilayah pelayanan yang luas.
- Pemerintah melalui Dinas Kesehatan telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan sanitasi yang menyeluruh diantaranya: pelatihan wirausaha sanitasi. Pemerintah merasa perlu untuk terus melakukan pemecuan dan melakukan sosialisasi sesuai budaya setempat.
- Beberapa SKPD dapat menjalin diskusi terkait pencapaian program sanitasi nasional pada tahun 2019. Diketahui bahwa kerjasama sinergis pernah terjalin, namun belum terjalin secara berkelanjutan. Dinas yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Kesehatan adalah seperti Dinas Koperasi dan Perdagangan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
- Belum ada kerjasama pemerintah dan institusi keuangan dalam skema pinjaman sanitasi.

Rekomendasi

Berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemimpin komunitas, lembaga pemerintah dan keuangan dalam mendukung target sanitasi nasional:

- Mendorong pemahaman pentingnya pembangunan jamban dengan mendiskusikan bersama cara yang paling efektif. Salah satu caranya yaitu dengan menerapkan mekanisme penalti berupa denda jika tidak membangun jamban pribadi.
- Menerapkan aturan bersama seluruh warga nagari untuk menjaga warisan alam dengan tidak mengotori sungai.
- Bidan, kader, sanitarian dan pendamping desa dapat melakukan advokasi pada saat penyusunan jenis usaha BUM Nag dengan mengusulkan kredit sanitasi.
- Menawarkan produk pinjaman dengan pembayaran jangka panjang menggunakan *Grameen* model.
- Menjadikan syarat kepemilikan jamban sebagai syarat utama dalam kredit lainnya yang diminati masyarakat.
- Dinas Kesehatan Kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dapat melakukan penjemabatan antar aktor rantai pasok sanitasi, terutama untuk wusan yang masih belum optimal melakukan kegiatan pemasaran.
- Upaya pemecuan PHBS dan LBS yang digalakkan oleh pemerintah tetap terus dilakukan melalui Dinas terkait terutama sanitarian dan bidan.
- Meningkatkan kerjasama pemerintah dengan lembaga keuangan mikro melalui MoU mengenai peningkatan bantuan modal terhadap wusan yang telah mendapatkan pelatihan.
- Guna memenuhi permintaan akan pembangunan jamban, perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas usaha wusan maupun usaha sanitasi lainnya





Executive summary

In Indonesia, 11.8% of households do not have access to improved sanitation. In West Sumatra, this figure is more than double at 24.2%. Because of this, the government has been implementing the Community-Led Total Sanitation (CLTS) program across Indonesia since 2006. The CLTS program aims to contribute towards achieving the national target of 100% access to sanitation by 2019, in support of Sustainable Development Goal number six on water and sanitation.

In 2016, SNV Netherlands Development Organization launched the Voice for Change (V4C) partnership in six countries, including Indonesia. The V4C Programme aligns with the national government's CLTS programme. SNV started the V4C Programme in four districts in the provinces of West Sumatra and Lampung: Padang Pariaman, Sijunjung, Pringsewu and Lampung Selatan. As part of the V4C Programme and to provide evidence to support civil society organisations (CSO) in advocating about sanitation, SNV commissioned research on the supply chain for sanitation products and services across their programme locations in Padang Pariaman and Sijunjung districts in West Sumatra province.

The aim of the study was to explore the supply and demand of sanitation products and services from three perspectives: the demand for sanitation products and services from existing and potential customers, the ability of organisations and individuals to trigger, realize and serve this demand, and whether the enabling environment enables or restricts supply and demand.

Methodology

The study framework made reference to the MIT Comprehensive Initiative on Technology Evaluation's (CITE) 3-S methodology (suitability, sustainability and scalability) for product evaluation, as the methodology was aligned with the objectives of the study. The study focused on the sanitation supply chain which corresponds to the scalability criteria: Can the supply chain effectively reach consumers? Specific research questions were developed based on the scalability criteria, with questions added to understand consumer demand towards sanitation, and the role of financial institutions, the government, and the community in supporting consumer demand and the supply chain.

The fieldwork was conducted in Padang Pariaman from 15 to 17 October 2017, and in Sijunjung from 12 to 14 October 2017. Information was collected by conducting group discussions with four groups of consumers in each village (men who used latrines, women who used latrines, men who did not use latrines, and women who did not use latrines), as well as individual interviews with representatives of supply chain actors, financial institutions and government agencies.

Findings and Discussion

The findings of the group discussions and interviews with the community, sanitation supply chain actors as well as financial and government institutions are as follows:

Community

- Consumers in Sijunjung and Padang Pariaman regencies understand the consequences of open defecation and are willing to obtain private latrines, but constructing latrines is still a low priority.
- There is limited knowledge of the appropriate design of septic tanks. Residents think that a good-quality septic tank comprises brick walls, a cover and adequate ventilation, but with an unsealed base
- There are several barriers to households constructing latrines, including: the high cost of construction and hiring masons, the low priority of constructing latrines, delaying latrine construction until the house has completed construction, limited access to water, and unsuitable topography (i.e. located on a cliff or steep mountainous area).
- The Sijunjung regency government and community have been promoting latrine construction by leveraging rotating savings and credit groups (arisan). Efforts are currently being intensified. In Padang Pariaman Regency, such initiatives do not yet exist, at least in the two villages visited, and should be promoted.
- Residents know or have heard about financial institutions from whom they can borrow money. However, people are reluctant to borrow from financial institutions, because they might not be able pay a regular monthly interest with their unstable incomes. Similarly, residents are reluctant to borrow from cooperatives because they are uncertain about whether they can meet the loan repayment schedule. There should be long-term loan products that make it easier for residents to pay over longer periods.
- Community-based financial institutions or banks (i.e. BUM Nag and Bank Perkreditan Rakyat) prioritise microenterprises that work in agriculture, livestock and trade microenterprises over entrepreneurs that work in sanitation. The lack of sanitation loan products may be attributed to poor consumer demand for latrines. There should be more urgency to promote ownership of latrines. With increased demand, loan products and sanitation enterprises can expand more effectively.

Sanitation Supply Chain Actors

- Sanitation supply chain actors such as material shops do not face significant difficulties in providing sanitation products. However, material suppliers in villages (nagari) need support. Sanitation enterprises and masons serving villages (nagari) or sub-districts are unable to access to large financial institutions such as Bank Rakyat Indonesia (BRI) or Bank Nagari.
- Sanitation chain actors are not officially recognised as independent micro, small and medium enterprises (MSME). Instead, they are usually considered MSMEs in the construction sector. Because of this, MSMEs are not prioritised by agencies that provide training services.
- Existing sanitation supply chain actors do not provide after-sales services, such as repairs if latrines are damaged, and desludging.

Financial Institutions

- Financial institutions do not provide sanitation loan products.
- Micro-finance institutions or KMN and banks, both BRI banks and Nagari banks, do not prioritise the provision of sanitation-related loan products. BUM Nag and BPR also do not prioritise sanitation enterprises because they have not observed significant demand for sanitation facilities by the community. Thus they are concerned about people defaulting on repayments.
- There is no cooperation between the government and financial institutions on sanitation loan schemes.
- *Nagari*-scale financial institutions require training and related government assistance on financial management and operating microcredit institutions.

Government

- There are insufficient numbers of sanitarians because of the large coverage area.
- The government through the Health Department (*Dinas Kesehatan*) has made several efforts to improve sanitation in general, including training in sanitation entrepreneurship. The government feels the need to continue triggering and socialising in a culturally-sensitive manner.
- Some regional cooperation agencies (*SKPD*) have been able to establish discussions related to the achievement of the national sanitation target by 2019. Cooperation has been established but not maintained with government agencies that have links to the Department of Health, such as the Department of Cooperatives and Trade and the Department of Community Empowerment and *Nagari*.
- There is no cooperation between the government and financial institutions on sanitation loan schemes.

Recommendations

Recommendations for community leaders, government agencies and financial institutions to support the national sanitation target are as follows:

- To promote the importance of latrine ownership through more effective discussions. One possible approach is to penalise households who have not built a latrine.
- To create village-wide regulations together with community to preserve the natural environment by not polluting the river (through open defecation).
- Midwives, cadres, sanitarians and villager facilitators can help to advocate when there is discussion about village-owned enterprises (*Bumdes*) to promote sanitation business.
- To offer long-term loans products to communities, modelled on the Grameen approach
- To include owning a latrine as a requirement for obtaining other, non-sanitation loan products
- Health Department and Community Empowerment Department can connect sanitation supply chain actors, especially sanitation entrepreneurs who do not actively market their products.
- To continue triggering activities, especially by supporting midwives and sanitarians in their work.
- To strengthen cooperation with microfinance institutions through agreements (such as memoranda of understanding) to increase funding to train sanitation entrepreneurs.
- To meet the demand for latrine construction, increase access to local products by improving the quality and quantity of sanitation enterprises.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	5
Executive summary	10
Daftar Isi	13
Pendahuluan.....	14
Tujuan	16
Metodologi	17
Kerangka penelitian.....	17
Sampling	19
Pengumpulan Data	20
Analisis Data	21
Keterbatasan	22
Hasil Penelitian	23
Padang Pariaman	23
Keinginan (Demand)	24
Rantai pasok	28
Dukungan Lingkungan.....	35
Sijunjung	38
Keinginan (Demand)	38
Rantai pasok.....	42
Dukungan Lingkungan.....	48
Diskusi	51
Padang Pariaman	51
Sijunjung	54
Kelebihan dan Kekurangan Metode 3-S dalam Penelitian.....	57
Kesimpulan	60
Rekomendasi	62
Annex.....	69

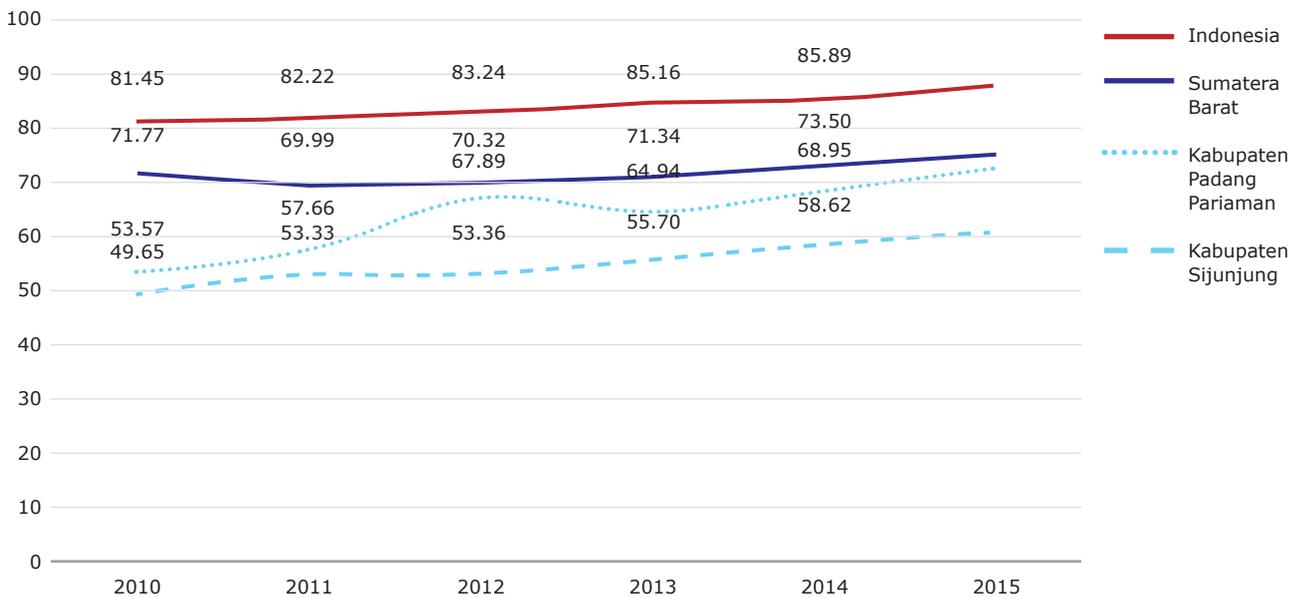
Pendahuluan

Di Indonesia, terdapat 10,84% rumah tangga yang belum memiliki sarana buang air besar sehingga praktik buang air besar sembarangan masih dilakukan. Capaian nasional terkini untuk akses terhadap sanitasi secara layak baru mencapai 67,2 % (BPS, 2016) dari 32,72% (BPS, 2005). Persentase tersebut mengalami peningkatan signifikan sejak diluncurkannya program "Sanitasi Total Berbasis Masyarakat" (STBM), yang dimana Program STBM ini bertujuan untuk berkontribusi dalam pencapaian target nasional 100% di bidang sanitasi pada tahun 2019, serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan poin 6 tentang air bersih dan sanitasi. Untuk itu, percepatan pembangunan di bidang sanitasi pada seluruh provinsi di Indonesia terus digalakan untuk mencapai target sanitasi 100%.

Untuk Provinsi Sumatera Barat sendiri, sekitar 23% dari lima juta penduduk belum memiliki akses terhadap sarana sanitasi yang layak, dimana sekitar satu juta lebih penduduk Sumatera Barat masih melakukan praktik BABS terutama di sungai. Pada tahun 2016, hanya sekitar 53,24% rumah tangga saja yang memiliki akses layak terhadap sanitasi. Gambar 1 menunjukkan perbandingan akses sanitasi di Sumatera Barat, nasional, serta data akses sanitasi Kabupaten Padang Pariaman dan Sijunjung.

Gambar 1 Akses sanitasi di Indonesia, Sumatera Barat dan lokasi penelitian

Fasilitas Tempat Buang Air, 2000-2015



Sumber: BPS Sumatera Barat, BPS Indonesia

Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan semua elemen masyarakat memiliki tugas untuk menuntaskan sekitar 46,76% rumah tangga yang belum mendapatkan akses sanitasi menuju target nasional 2019.

Pendekatan STBM yang dilakukan di Indonesia terdiri dari tiga strategi yang harus dilaksanakan secara seimbang dan komprehensif, yaitu: 1) peningkatan kebutuhan sanitasi, 2) peningkatan penyediaan akses sanitasi, dan 3) penciptaan lingkungan yang kondusif.

Selain itu, diperlukan pula pendekatan terhadap perubahan perilaku yang dilakukan masyarakat sendiri secara mandiri dengan melakukan pemicuan. Adapun prinsip dari pemicuan ini adalah masyarakat sebagai pemimpin, tidak ada subsidi, dan tidak ada pemaksaan kepada masyarakat, dimana dalam pendekatan ini semua elemen masyarakat diharapkan dapat terlibat dalam akses sanitasi yang baik, yakni dengan memiliki pengetahuan tentang sanitasi dan memiliki keinginan bersama untuk mengadakan pembangunan jamban.

Pendekatan STBM juga bertujuan untuk menciptakan penyediaan akses sanitasi melalui rantai pasok dan wirausaha sanitasi (*wusan*) baik secara berkelompok maupun individu. Ada lima pilar dalam program STBM yaitu: STOP buang air besar sembarangan (BABS), cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Desa yang mencapai pilar pertama disebut desa Bebas Buang Air Besar Sembarangan, sementara desa yang mencapai kelima pilar tersebut disebut desa STBM.

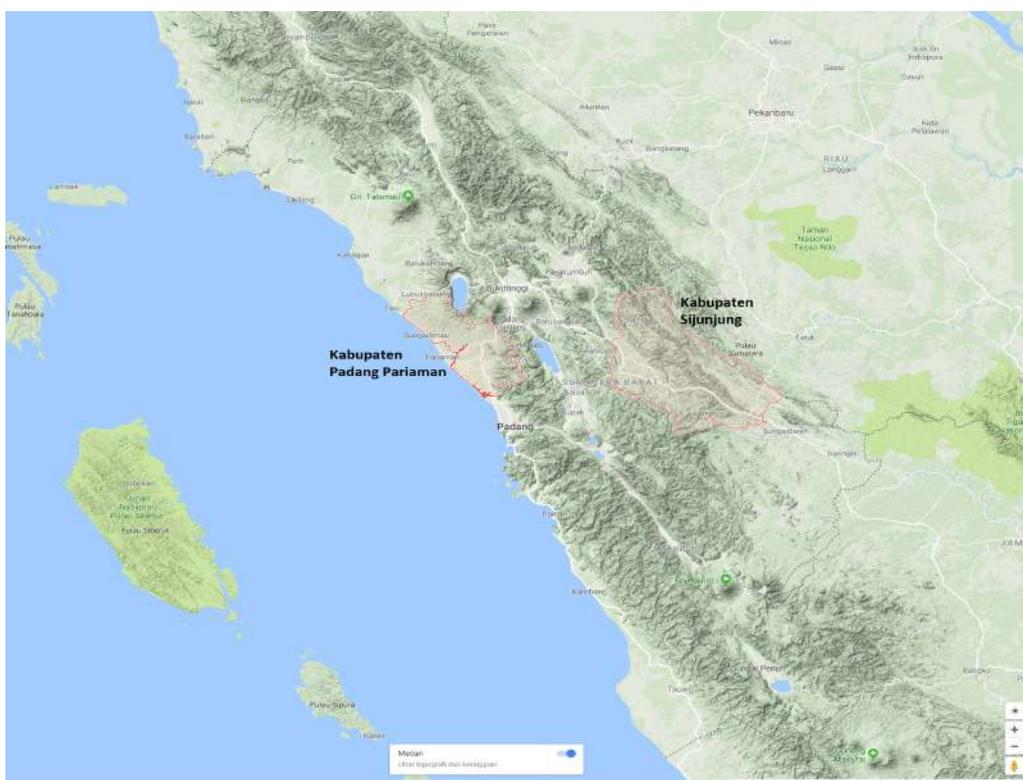
Dalam mendukung pencapaian akses universal untuk sanitasi, pada tahun 2016, **SNV Netherlands Development Organization** meluncurkan program kemitraan *Voice for Change Partnership (V4CP)* di enam negara, termasuk Indonesia. Program V4CP ini sejalan dan mendukung program nasional pemerintah yaitu STBM. SNV memulai Program V4CP di empat lokasi di Sumatera Barat dan Lampung: Padang Pariaman, Sijunjung, Pringsewu dan Lampung Selatan. Dengan program ini, SNV berusaha mendukung *Civil Society Organizations/Organisasi Masyarakat Sipil (CSO)* dalam memperkuat hubungan antar pemangku kebijakan sehingga dapat memengaruhi proses pembuatan agenda kebijakan dan meningkatkan akuntabilitas dari para pemangku kebijakan tersebut dalam sektor sanitasi khususnya dengan pendekatan program STBM. Program ini memprioritaskan pentingnya sanitasi bagi pembangunan manusia, lingkungan dan ekonomi, serta menunjukkan relevansi dan bukti betapa pentingnya sanitasi untuk memberikan hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari Program V4CP dan proses penyediaan bukti untuk mendukung kegiatan advokasi yang dilakukan CSO terhadap topik sanitasi, SNV mengadakan penelitian mengenai penawaran, permintaan produk dan layanan sanitasi di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan

Adapun tujuan dari analisis rantai pasok sanitasi adalah untuk mendalami persediaan dan permintaan produk dan layanan sanitasi di Kabupaten Padang Pariaman dan Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Gambar 2). Analisis ini melibatkan tiga perspektif penting yang diperlukan untuk meningkatkan akses terhadap sanitasi yaitu permintaan akan produk dan layanan sanitasi dari konsumen yang ada dan yang potensial, kemampuan organisasi dan individu untuk memicu, mewujudkan, dan melayani permintaan akan produk dan layanan sanitasi serta apakah ada dukungan lingkungan yang mendukung atau menghambat permintaan akan pasokan sanitasi.

Gambar 2 Lokasi penelitian (Sumber: Google Maps)



Adapun tujuan spesifik dari penelitian ini antara lain:

- Mengidentifikasi keterbatasan aktor rantai pasok untuk memenuhi permintaan konsumen dan kebutuhan sanitasi dengan mengidentifikasi rantai pasok dan memetakan produk dan layanan yang tersedia;
- Mengidentifikasi penyebab kekurangan permintaan konsumen terhadap produk sanitasi tentang mengapa rumah tangga tidak mau atau tidak mampu memiliki jamban
- Mengidentifikasi kemungkinan sektor keuangan mikro untuk mendukung rantai pasok dengan memetakan lembaga keuangan dan kredit mikro yang ada.

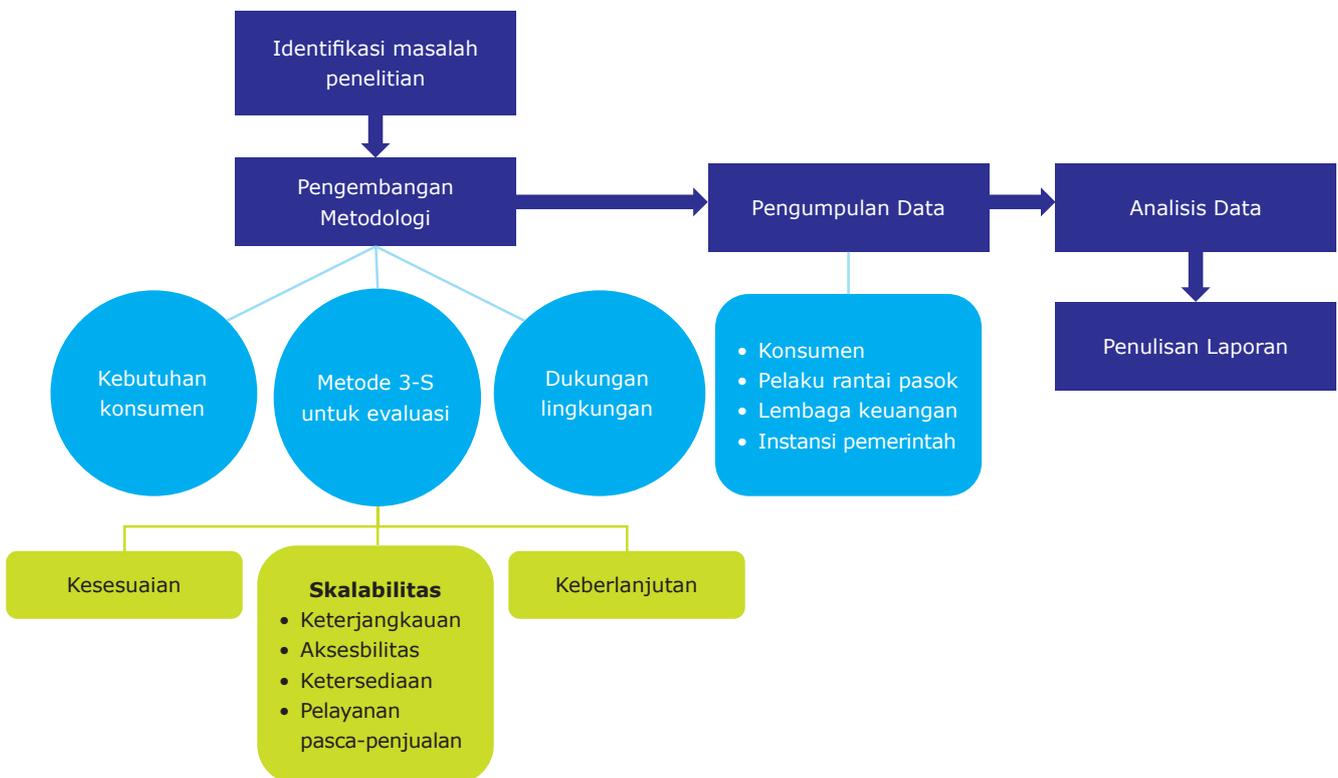
Metodologi

Demi tercapainya tujuan penelitian, kerangka penelitian dibuat mengacu pada kriteria skalabilitas metodologi yang dikembangkan oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT) *Comprehensive Initiative on Technology Evaluation* (CITE) 3-S untuk evaluasi produk. Data kualitatif dikumpulkan dari hasil konsultasi dengan konsumen, pelaku rantai pasok, lembaga keuangan, dan instansi pemerintah di Padang Pariaman dan Sijunjung melalui wawancara individual dan diskusi kelompok.

Kerangka penelitian

Kerangka penelitian studi ini mengacu pada metodologi MIT CITE 3-S untuk evaluasi produk, yang sesuai dengan fokus studi ini yaitu produk dan layanan sanitasi. Metodologi ini dipilih karena fokusnya pada evaluasi produk dengan kriteria dan faktor yang jelas, sehingga memungkinkan data dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis.

Gambar 3 Gambaran pendekatan penelitian



Metodologi untuk evaluasi produk terdiri dari tiga kriteria:

1. Kesesuaian: Apakah produk menunjukkan hasil yang sesuai dengan tujuannya atau tidak. Misalnya dengan menimbulkan pertanyaan: apakah jamban dan tangki septik dapat menyimpan kotoran manusia tanpa mengkontaminasi lingkungan di sekitarnya? Apakah kotoran dapat dengan mudah dan aman dihilangkan oleh tangki septik? Apakah desain jamban sesuai dengan SNI?

2. Skalabilitas: Dapatkah rantai pasok 3-S CITE mencapai konsumen secara efektif? CITE mendefinisikan skalabilitas sebagai 'kemampuan institusi/lembaga/badan usaha untuk memperluas dan memenuhi permintaan konsumen, dengan mempertimbangkan konfigurasi, biaya, kendala, konteks, dan risiko rantai pasok, yang mencakup proses dari pembelian bahan baku sampai pengiriman barang jadi, termasuk layanan penjualan. Dalam kriteria skalabilitas, ada empat faktor yang dipertimbangkan yaitu:

- *Affordability*/Keterjangkauan harga. Harga produk tidak melebihi kemampuan atau kemauan untuk membayar. Hal ini mencakup modal investasi dan kebutuhan perawatan/maintenance, serta akses untuk pembiayaan.
- Aksesibilitas. Konsumen tidak sulit menemukan badan usaha.
- *Availability*/Ketersediaan. Penyediaan produk dilakukan dalam jumlah yang cukup sesuai dengan permintaan konsumen.
- *After-sales service*/Pelayanan pasca-penjualan. Pelayanan perawatan produk setelah pembelian oleh konsumen, termasuk layanan dan/atau suku cadang yang diperlukan.

3. Keberlanjutan: Apakah produk dapat digunakan secara benar, konsisten, dan berlanjut terus-menerus seiring berjalannya waktu atau tidak. Produk dipasarkan dalam sistem sosial ekonomi yang lebih besar sehingga memengaruhi konsumen dalam mengadopsi dan menggunakan produk tersebut. Berdasarkan kriteria ini, CITE telah menggunakan sub kriteria berikut:

- Sosial: Sejauh mana produk sesuai dengan norma sosial masyarakat sekitar konsumen.
- Ekonomi: Apakah biaya operasi dan perawatan awal dan berkelanjutan sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen dalam membayar.
- Manfaat yang dirasakan: Sejauh mana produk memberikan kepuasan konsumen untuk memberikan produk yang sesuai dengan harapan dalam memenuhi kebutuhan mereka.
- Kegunaan: Apakah konsumen yakin bahwa mereka dapat menggunakan produk dengan benar untuk mendapatkan keuntungan tertinggi, apakah konsumen memiliki platform untuk belajar bagaimana menggunakan produk tersebut, dan apakah konsumen yakin bahwa produk akan terus beroperasi sesuai harapan mereka.

Dengan adanya ketiga kriteria tersebut, metode CITE dapat digunakan untuk menyelidiki kriteria spesifik manakah yang paling dibutuhkan. Sejalan dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengenai rantai pasokan sanitasi, kerangka penelitian ini berfokus pada kriteria skalabilitas yang dimana kriteria ini digunakan sebagai panduan karena secara spesifik membahas rantai pasok dan dianggap sebagai kriteria yang paling tepat untuk menjawab tujuan penelitian. Namun, dalam hasil diskusi penelitian ini, juga akan dibahas sedikit mengenai kriteria kesesuaian dan keberlanjutan.

Pertanyaan spesifik penelitian (Tabel 1) dirumuskan berdasarkan kriteria skalabilitas, dengan pertanyaan tambahan untuk mengetahui permintaan pelanggan akan sanitasi, dan peran lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat, yang mendukung permintaan pelanggan dan aktor rantai pasok.

Tabel 1 Pertanyaan spesifik penelitian

Kategori / Kriteria	Sub-kriteria	Pertanyaan Penelitian
Kebutuhan konsumen	Kemauan memiliki	<ul style="list-style-type: none"> • Apa alasan mengapa konsumen membangun jamban? • Apa alasan mengapa konsumen tidak ingin memiliki jamban? • Langkah-langkah awal apa saja yang diimplementasikan untuk menstimulir permintaan konsumen?
Deskripsi rantai pasok		<ul style="list-style-type: none"> • Produk dan layanan apa yang ditawarkan kepada siapa dan dimana? • Kegiatan apa yang dilakukan untuk menyampaikan produk dan layanan ini? • Langkah-langkah awal apa saja yang diimplementasikan untuk mendukung aktor rantai pasok?
Keterjangkauan	<i>Landed cost</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah harga produk melalui semua tahapan dari rantai pasok masuk akal?
	Harga	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah konsumen mampu membayar produk, termasuk operasi dan perawatan? • Apakah konsumen mau membayar produk? Jika tidak, mengapa?
	Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Apa pilihan pembayaran yang tersedia untuk memungkinkan pelaku rantai pasok/konsumen membeli produk? • Apakah pelaku rantai pasok / konsumen dapat mengakses pilihan pembiayaan? • Apakah pelaku rantai pasok / konsumen bersedia memanfaatkan opsi pembiayaan? Jika tidak, mengapa?
Ketersediaan	Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah pelaku rantai pasok dapat memperoleh bahan baku dan komponen produk yang dibutuhkan dengan kuantitas dan harga yang memadai?
	Inventaris	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah pelaku rantai pasok mampu memenuhi permintaan dari konsumen?
Aksesibilitas	Jangkauan konsumen	<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja tantangan yang dihadapi oleh aktor rantai pasok dalam menjangkau konsumen baru? • Apakah konsumen tahu dimana untuk membeli produk dan layanan? • Apakah konsumen dapat menjangkau pengecer dan penyedia layanan?
Layanan purna jual	Pemeliharaan	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah pelaku rantai pasok menawarkan perbaikan atau layanan perawatan? • Apa yang dilakukan konsumen saat jamban mereka rusak atau penuh?

Sampling

Untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel purposif dimana grup responden dipilih yang dianggap relevan dan dapat menyediakan informasi pada pertanyaan-pertanyaan penelitian tertentu guna mendapatkan data. Adapun kategori responden yang dipilih adalah sebagai berikut:

- Konsumen: dibagi menjadi dua kelompok yaitu yang telah memiliki dan menggunakan jamban sendiri dan kelompok yang tidak menggunakan dan memiliki jamban.
 - Konsumen yang sudah membangun dan menggunakan jamban, ditanyakan mengenai pengalaman mereka ketika mereka memutuskan membangun jamban, bagaimana teknik pembangunan dan alokasi dana yang dihabiskan untuk pembangunan jamban dan apakah mereka menggunakan produk dan layanan sanitasi lainnya.
 - Kelompok yang tidak menggunakan jamban, ditanyakan mengenai alasan mereka tidak membangun jamban, dan bagaimana mereka akan membangun dan menggunakan alokasi dana pembangunan jamban jika mereka memutuskan untuk melakukannya.

- Pelaku rantai pasok, ditanyakan penjelasan terkait bisnis berdasarkan produk dan layanan yang mereka tawarkan, bagaimana mereka memperoleh bahan baku mentah dan komponen produk yang dibutuhkan, bagaimana mereka menjangkau pelanggan baru, serta kekuatan dan kelemahan bisnis mereka.
- Lembaga keuangan, diminta untuk menjelaskan produk pembiayaan yang mereka tawarkan, terutama berkaitan dengan pembiayaan sanitasi. Jika lembaga keuangan tidak menawarkan produk sanitasi, mereka juga ditanyakan alasannya.
- Instansi pemerintah yang berperan dalam sektor ini ditanyakan terkait inisiatif mereka dalam mempromosikan sanitasi yang baik dan tantangan yang dihadapi.

Pada setiap kabupaten, penelitian lebih fokus dilakukan di dua desa dimana salah satu desa memiliki akses sanitasi yang tinggi, dan lainnya dengan akses sanitasi yang rendah dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Selain akses terhadap sanitasi, dipertimbangkan pula faktor terkait lainnya seperti: ketersediaan skema keuangan terhadap sanitasi, ketersediaan wirausaha sanitasi dan keadaan topografi desa. Penentuan desa dengan akses sanitasi tinggi dan rendah dilakukan oleh mitra lokal SNV, berdasarkan studi terkait yang telah dilakukan sebelumnya oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kabupaten Sijunjung dan Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas terhadap sanitasi.

Pengumpulan Data

Penelitian lapangan dilakukan di Padang Pariaman pada 15-17 Oktober 2017 dan di Sijunjung pada 12-14 Oktober 2017. Rencana awal dilakukan dengan mengadakan diskusi kelompok dengan empat kelompok konsumen (pria yang menggunakan jamban, wanita yang menggunakan jamban, pria yang tidak menggunakan, dan wanita yang tidak menggunakan jamban) di setiap desa, serta wawancara individu dengan perwakilan pelaku rantai pasokan, lembaga keuangan, dan instansi pemerintah selama tiga hari di setiap lokasi.

Dalam diskusi kelompok, pembagian dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan sudut pandang konsumen yang telah menggunakan jamban dengan yang belum menggunakan jamban, dimana warga dengan jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan dipisahkan agar masing-masing kelompok lebih nyaman berbicara, sehingga diharapkan lebih banyak informasi yang dapat digali. Namun, dalam pelaksanaan pengambilan data, terdapat kendala teknis yang terjadi serta hal-hal yang tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana, seperti di Kabupaten Sijunjung, pelaku wirausaha sanitasi tidak sempat diwawancarai, sedangkan di Kabupaten Padang Pariaman, tim tidak dapat mewawancarai sanitarian dan bidan desa Nagari Pauh Kamar.

Akan tetapi, informasi yang diperlukan masih dapat digali dari sumber informan lainnya. Beberapa narasumber juga lebih nyaman menggunakan bahasa daerah sehingga dilakukan penerjemahan dan pencatatan kembali. Namun begitu, proses pengumpulan data dapat berjalan dengan lancar karena kerjasama yang baik antara mitra lokal SNV dan narasumber. Data wawancara dicatat pada lembar sementara dan dilakukan pencatatan kembali dari rekaman wawancara untuk memastikan ketepatan informasi yang diterima. Selain itu, data juga diperoleh berdasarkan laporan dari penelitian sebelumnya.

Daftar responden yang diwawancarai dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Responden yang berpartisipasi dalam penelitian

	Padang Pariaman	Sijunjung
Konsumen	<p>Nagari Pauh Kamar, Kecamatan Nan Sabaris (akses sanitasi yang rendah)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7 orang (4 laki-laki; 3 perempuan) dengan jamban • 10 orang (2 laki-laki; 8 perempuan) tanpa jamban <p>Nagari Sikucua Barat, Kecamatan Koto Kampung Dalam (akses sanitasi yang tinggi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14 orang (5 laki-laki; 9 perempuan) dengan jamban, • 1 orang (laki-laki) tanpa jamban 	<p>Nagari Latang, Kecamatan Lubuak Tarok (akses sanitasi yang rendah)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 orang (4 laki-laki; 4 perempuan) dengan jamban • 8 orang (4 laki-laki; 4 perempuan) tanpa jamban <p>Nagari Batu Manjuler Kecamatan Kupitan (akses sanitasi yang tinggi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7 orang (3 laki-laki; 4 perempuan) dengan jamban • 10 orang (6 laki-laki, 4 perempuan) tanpa jamban
Aktor rantai pasok	<ul style="list-style-type: none"> • 2 toko bangunan besar (Kota Padang) • 1 toko bangunan (Kecamatan Ulakan Tapakis) • 1 toko bangunan (Kecamatan 2X11 Enam Lingkung) • 1 wusan (Kecamatan Nan Sabaris) • 1 wusan (Kecamatan Koto Kampung Dalam) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 penyuplai nagari (Kecamatan Lubuak Tarok) • 2 toko bangunan (Kecamatan Koto VII) • 1 toko bangunan (Kecamatan Kupitan) • 1 tukang (Kota Sijunjung)
Lembaga Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Baznas Kab. Padang Pariaman • BPR Cincin Andalas Kab. Padang Pariaman • BUM Nag Parit Malintang 	<ul style="list-style-type: none"> • Bank Rakyat Indonesia Kab. Sijunjung • Bank Nagari Kab. Sijunjung • Kredit Mikro Nagari Kotobaru • Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Latang
Lembaga Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman • Dinas Penanaman Modal • Koperasi dan UKM Dinas Perdagangan Tenaga Kerja, Kab. Padang Pariaman • Wakil Sekretaris Nagari Pauh Kamar, Kecamatan Nan Sabaris • Puskesmas Kecamatan Nan Sabaris • Sekretaris Wali Nagari Sikucua Barat, Kecamatan Koto Kampung Dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan Kab Sijunjung • Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari • Dinas Koperasi dan Perdagangan • Wali Nagari Latang dan Batu Manjuler • Bidan Desa Latang • Bidan Desa Batu Manjuler • Sanitarian Nagari Batu Manjuler

Selain bukti rekaman audio, surveyor juga mencatat selama wawancara berlangsung. Setelah pengambilan data dilakukan, tim peneliti juga merekapitulasi kembali catatan/form wawancara dengan mendengarkan kembali rekaman untuk melengkapi semua informasi.

Analisis Data

Setelah melakukan penelitian lapangan, catatan dari hasil setiap wawancara/diskusi ditinjau kembali dengan mendengarkan rekaman audio untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan sudah termasuk dalam catatan. Selanjutnya, data untuk masing-masing kabupaten digabungkan dengan memasukkan catatan yang relevan dalam sebuah tabel sesuai dengan kerangka kerja penelitian (kebutuhan konsumen, penjelasan mengenai rantai pasok, keterjangkauan, ketersediaan, aksesibilitas, dan pelayanan pasca jual) yang dibedakan berdasarkan tipe dari responden (konsumen, aktor rantai pasok, lembaga keuangan, dan pemerintah). Setelah itu, data gabungan dianalisis dengan mendeskripsikan poin utama permintaan pelanggan dan rantai pasok, mengidentifikasi kendala untuk meningkatkan permintaan sanitasi dan rantai pasok yang efisien, serta peran pemerintah, lembaga keuangan dan pihak lainnya yang terlibat dalam proses ini.

Keterbatasan

Dengan adanya limitasi sumber daya dan waktu untuk melakukan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang perlu diketahui. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Adanya rotasi kerja staff pemerintah sehingga data tidak diperoleh mendalam karena pemangku jabatan yang berwenang masih baru menjalankan tugas, sehingga narasumber diganti dengan staff yang berpengalaman. .
- Kesulitan untuk mendapatkan informasi tertentu seperti mengenai usaha penambahan modal, karena beberapa aktor rantai pasok menolak untuk menjelaskan lebih jauh. Namun demikian, penelitian ini dapat mengidentifikasi kendala dan peluang untuk meningkatkan akses terhadap sanitasi melalui intervensi permintaan dan penawaran.

Laporan ini dimaksudkan untuk menyajikan studi kasus di Padang Pariaman dan Sijunjung. Dengan demikian, temuan ini tidak dapat mewakili keseluruhan kondisi Provinsi Sumatera Barat atau lokasi lainnya.



Hasil Penelitian

Padang Pariaman

Penelitian studi ini mengacu pada metodologi MIT CITE 3-S untuk evaluasi produk dengan fokus pada produk dan layanan sanitasi. Terdapat tiga kriteria evaluasi produk yang dipakai, diantaranya: Kesesuaian produk dengan tujuannya, skalabilitas sebagai kemampuan institusi/lembaga/badan usaha untuk memperluas dan memenuhi permintaan konsumen, serta keberlanjutan penggunaan produk secara konsisten dalam jangka waktu panjang.

Sejalan dengan tujuan penelitian mengenai rantai pasokan sanitasi, kerangka penelitian ini memiliki fokus pada kriteria skalabilitas, dengan tambahan sedikit pembahasan mengenai kriteria kesesuaian dan keberlanjutan yang dapat memberikan gambaran lebih besar mengenai rantai pasok sanitasi di lokasi penelitian.

Pertanyaan spesifik penelitian pada Tabel 1 dirumuskan berdasarkan kriteria skalabilitas, mencakup kebutuhan konsumen (keinginan memiliki jamban), keterjangkauan harga, ketersediaan, aksesibilitas, layanan purna jual, serta deskripsi rantai pasok, dan peran lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat, yang mendukung permintaan pelanggan dan aktor rantai pasok.

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, sekitar 70%-80% warga Kabupaten Padang Pariaman sudah memiliki jamban, akan tetapi 10% di antara mereka masih membuang buangnya langsung ke sungai atau belakang rumah. Di dua nagari/desa dalam Kabupaten Padang Pariaman di mana diskusi fokus grup/FGD dilaksanakan yaitu Nagari Pauh Kamar, Kecamatan Nan Sabaris dan Nagari Sikucua Barat, Kecamatan Koto Kampung Dalam, dinilai mempunyai tingkat kepemilikan jamban yang berbeda.

Di Nagari Pauh Kamar, tingkat kepemilikan jamban cukup rendah dimana dapat terlihat dari banyaknya warga belum memiliki jamban pribadi. Masyarakat yang memiliki jamban pun kebanyakan belum memiliki tangki septik dimana sebagian masyarakat masih membuang langsung ke lubang tanah yang digali di bawah bangunan jamban ataupun terdapat juga yang mengalirkan buangan ke banda/perairan maupun kolam ikan. Di Nagari Sikucua Barat, tingkat kepemilikan jamban cenderung tinggi, akan tetapi sebagian besar warga Nagari Sikucua Barat menyatakan jamban mereka belum lengkap karena belum ada tangki septik.

...Namanya juga punya anak-anak, kan kasihan...jauh ke sungai....kadang susah juga... sungai banjir...
(Warga FGD Nagari Pauh Kamar)

...Jauh...sedekat-dekatnya...25m ada lah...karena sungainya pindah-pindah... jarak tempuhnya berubah-ubah... enaknyanya (sudah punya jamban) kalau sesak langsung (ke jamban)...ndak jauh
(Warga FGD Nagari Sikucua Barat)

Keinginan (Demand)

Keinginan: Masyarakat yang ditemui baik di kedua nagari/desa pada umumnya mau memiliki jamban. Ada beberapa hal yang menyebabkan masyarakat mau memiliki jamban atau toilet:

1. Keamanan; masyarakat merasa aman untuk buang air walaupun malam. Warga juga merasa aman membiarkan anak-anak buang air sendiri.
2. Praktis; karena berada di dekat/bagian dari rumah, kalau sesak buang air, tidak perlu berjalan jauh. Juga tidak perlu jalan jauh ke sungai, karena akses ke sungai tidak selalu mudah.
3. Kesehatan; sebagian warga merasa takut gatal-gatal apabila air sedang kotor. Selain itu, karena adanya pemicuan, beberapa warga merasa tumbuh kesadaran ingin memiliki jamban.

Menurut Puskesmas Kecamatan Nan Sabaris, belakangan ini kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi sudah mulai meningkat. Salah satu faktor yang membantu adalah aktifnya kegiatan pemicuan dan juga penyebaran informasi melalui PKK, dimana sering dilakukan kegiatan seperti memasak, perlombaan, dan juga bersih-bersih lingkungan. Dengan seringnya terselenggaranya perkumpulan, hal ini berpotensi menjadi sumber perluasan informasi dalam rangka peningkatan akses sanitasi.

Di Nagari Pauh Kamar, upaya peningkatan kesadaran terhadap kesehatan lingkungan juga dilakukan dengan pembinaan dan penyuluhan, dan kegiatan pembuatan sarana jamban lengkap dengan tangki septik yang sesuai. Petugas kesehatan lingkungan dari puskesmas melakukan pemicuan dengan media seperti *leaflet* serta gambar. Biasanya untuk mendekati masyarakat, petugas juga melakukan koordinasi dengan bidan desa untuk menyebarkan informasi mengenai kesehatan lingkungan dan sanitasi ketika melakukan penyuluhan khusus untuk ibu dan anak.

Menurut staf Puskesmas Kecamatan Nan Sabaris, kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya minat masyarakat. Pada saat ini, sosialisasi dari pemerintah sudah tidak berupa pemberian bantuan melainkan sosialisasi dalam bentuk pemicuan dan pelatihan-pelatihan. Sebagian masyarakat biasanya tertarik dengan program yang berupa pemberian bantuan.

Gambar 4 Salah satu proses FGD bersama warga di Kabupaten Padang Pariaman



Staf Puskesmas yang diwawancarai juga mengakui bahwa kegiatan dan program kesehatan lingkungan di kecamatan Nan Sabaris cenderung lancar, tetapi terhambat di bagian dana. Selain itu, ada keterbatasan tenaga kerja yang menjadikan pengadaan sosialisasi belum optimal dilaksanakan. Di Nagari Pauh Kambar, posisi bidan desa kosong dan hanya ada satu petugas kesling untuk satu nagari (sekitar 1.200 orang).

Di Nagari Sikucua Barat, karena akses jalan dan lokasi yang sulit warga ragu untuk melanjutkan pembangunan jamban, terutama membuat tangki septik. Sejauh ini, mereka belum menemukan truk penyedot/penguras tinja yang mau melayani kawasan Nagari Sikucua Barat. Terdapat pula tantangan lain dalam pembangunan tangki septik yaitu muka air tanah yang dangkal sehingga masyarakat merasa kesulitan untuk membangun tangki septik yang ideal dengan biaya yang relatif terjangkau. Selanjutnya, walaupun pada umumnya warga menyatakan mereka ingin memiliki jamban, prioritasnya cenderung rendah dibandingkan kebutuhan lainnya. Warga cenderung lebih mementingkan kebutuhan lain seperti makan sehari-hari dan sekolah anak.

Menurut bidan Nagari Sikucua Barat, pada tahun 2016 pernah diadakan sosialisasi/penyuluhan pengadaan jamban ke rumah-rumah, sejalan dengan program Pamsimas. Sosialisasi tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) juga sudah sering disosialisasikan dan sudah disadari masyarakat, namun masih ada perilaku masyarakat yang memang tidak mau membuat jamban karena sudah nyaman buang air besar di sungai. Persediaan air bersih juga merupakan tantangan dalam membangun jamban. Bahkan di beberapa tempat, masyarakat pernah melakukan perjanjian, bahwa jika air sudah tersedia, akan membangun jamban. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dimana warga umumnya masih belum mau bangun jamban karena terkendala air bersih, sehingga merasa kesulitan untuk membersihkan diri di rumah.

Kemauan untuk membayar: Pada umumnya, warga yang memiliki jamban sejauh ini sudah mengeluarkan uang Rp 1.000.000,00 - Rp 2.500.000,00 untuk membangun jamban. Warga yang memiliki jamban pada umumnya merasa harga tersebut pantas, dan cukup puas dengan jamban yang dimiliki untuk uang yang telah dikeluarkan. Masyarakat yang telah memiliki jamban menyatakan mereka membiayai pembangunan jamban dengan menabung atau menyisihkan sebagian uang belanja. Beberapa juga meminjam atau mendapat bantuan dari kerabat.

Masyarakat yang ditemui di Kabupaten Padang Pariaman pada umumnya mengemukakan bahwa penyebab utama mereka belum memiliki jamban (atau belum memiliki bangunan jamban yang lengkap) adalah kurangnya dana. Warga yang belum memiliki jamban cenderung merasa uang yang diperlukan sangat banyak (Rp1.000.000,00 - Rp5.000.000,00). Warga yang belum memiliki jamban cenderung memperkirakan bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun jamban lebih mahal daripada kenyataan harga di pasaran, dan merasa ada prioritas lain sehingga belum memiliki jamban.

Untuk menghemat biaya pembuatan jamban, sebagian besar warga membangun jamban dengan gotong-royong. Warga merasa jamban akan menjadi mahal jika menggunakan tukang dan dikhawatirkan akan memperpanjang pengerjaan pembangunan sehingga tidak efisien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mengenai cara membangun jamban dan tangki septik yang baik sangat diperlukan bahkan untuk level masyarakat di Nagari.

Menurut responden di Nagari Pauh Kambar, pernah diadakan pelatihan membuat bangunan jamban mulai dari tangki septik, memasang jamban, dan bangunan kamar mandi oleh institusi non-pemerintah di tingkat kecamatan selama 3 hari. Namun, mereka tidak mendapatkan pelatihan untuk membuat secara mandiri untuk dudukan jambannya. Pelatihan ini mencakup dua hari

pengajaran teori dan satu hari praktik dimana beberapa rumah dipilih untuk dibangun jamban oleh peserta pelatihan. Hal ini dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat untuk membuat bangunan jamban, sehingga mereka bisa melakukan secara mandiri dan menghemat biaya tukang. Kunjungan perawatan/*maintenance* untuk pelatihan pembangunan jamban ini juga pernah dilakukan, tetapi kegiatan tersebut belum dilaksanakan lagi.

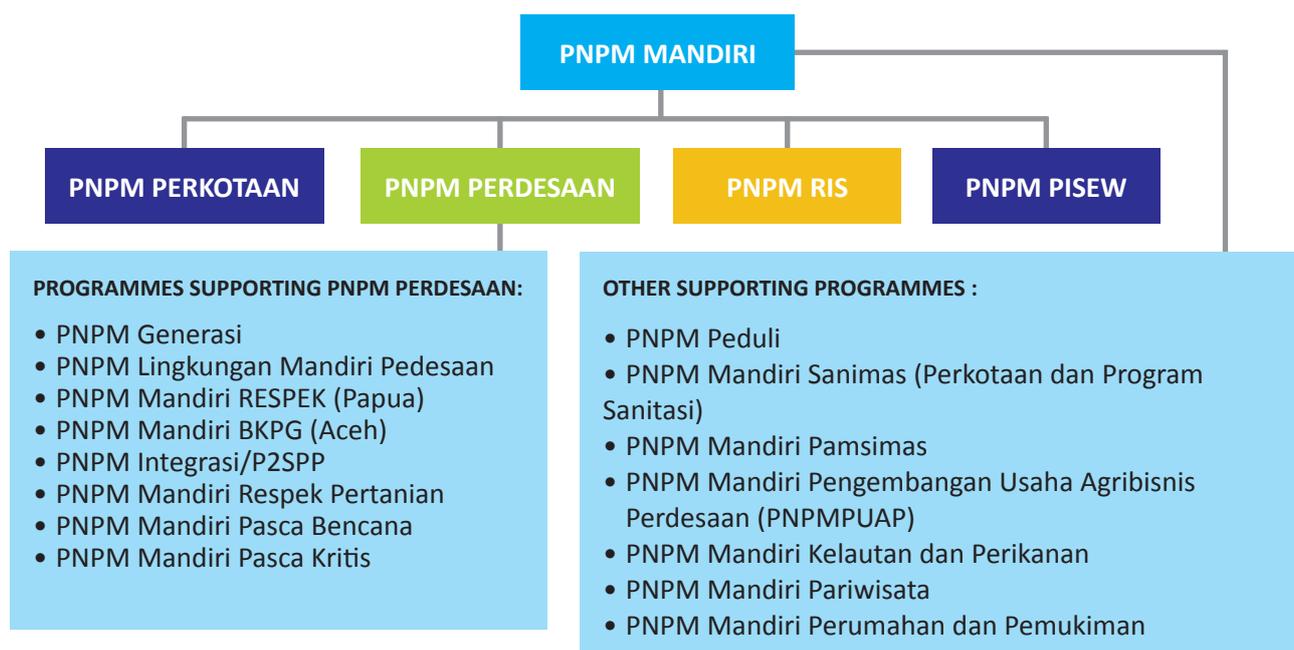
Bahan-bahan seperti pasir dan kerikil bisa dikumpulkan dari sungai-sungai sekitar sehingga dapat menghemat biaya. Selain itu, di sebagian besar tempat terdapat satu toko bahan bangunan dalam satu nagari, sehingga pengadaan bahan untuk pembangunan jamban dinilai tidak sulit. Akan tetapi, warga Nagari Sikucua Barat mengalami hambatan kondisi alam. Karena kondisi jalan menuju Nagari Sikucua Barat kecil dan berkelok-kelok, warga menyatakan terdapat kenaikan harga guna mengupayakan bahan sampai ke nagari. Hal ini juga dapat merepresentasikan keadaan nagari-nagari lain yang relatif jauh dan terpencil. Adanya kekurangan fasilitas pengurusan jamban untuk masyarakat di kawasan yang terisolasi secara geografis, di sisi lain bisa menjadi potensi untuk dimasuki usaha sanitasi, seperti penguras tangki septik dengan kendaraan lebih kecil.

Di Nagari Pauh Kamar dan Nagari Sikucua Barat, masyarakat mengetahui adanya lembaga mikrokredit melalui program PNPM, yang sebagian besar mereka temui menawarkan pinjaman untuk kegiatan perdagangan atau usaha. Dari hasil diskusi dengan warga, ada kemungkinan program PNPM Mandiri yang dimaksud adalah PNPM yang bergerak di bidang agribisnis. Masyarakat di nagari-nagari yang dikunjungi di kabupaten Padang Pariaman sebagian besar bergerak di bidang pertanian atau agribisnis.

Berdasarkan TNP2K, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini mempunyai jangkauan perdesaan dan perkotaan secara umum. PNPM Mandiri yang mendukung pembangunan di perdesaan dapat dilihat pada Gambar 5.

PNPM Mandiri yang bergerak di bidang bisnis pertanian adalah PNPM Mandiri Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PNPMPUAP). PUAP adalah bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani, maupun rumah tangga tani. Karena masyarakat di pedesaan yang ditemui banyak bergerak di bidang pertanian, jenis PNPM Mandiri ini yang kemungkinan banyak didengar dan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk pinjaman yang dikhususkan di bidang sanitasi, pada umumnya masyarakat di nagari-nagari yang dikunjungi di kabupaten Padang Pariaman belum pernah mendengarnya.

Gambar 5 Program-program PNPM Mandiri yang mendukung pembangunan pedesaan



(sumber: Infografis TNP2K, Agustus 2014)

Beberapa warga mengatakan bahwa mereka juga pernah meminjam untuk usaha, namun mereka belum pernah mendengar adanya pinjaman khusus untuk sanitasi. Pendapatan bulanan yang tidak stabil menyebabkan mereka ragu untuk mengajukan pinjaman berjangka. Masyarakat cenderung enggan meminjam dari lembaga keuangan karena keharusan membayar bunga. Warga yang ditemui sebagian besar memiliki mata pencaharian di bidang pertanian dimana pendapatan bulanan kurang stabil sehingga mereka keberatan membayar bunga. Warga takut tidak dapat melunasi pembayaran pinjaman saat jatuh tempo.

Sebagai salah satu alternatif pembiayaan untuk produk sanitasi, baik di Nagari Pauh Kamar maupun Nagari Sikucua Barat belum pernah mengadakan arisan jamban, di mana ibu-ibu berkumpul, menabung secara berkala, mengundi arisan, dan yang mendapat arisan akan dibangunkan jamban bersama menggunakan uang tabungan bersama tersebut. Hal ini berpotensi dapat dilakukan terutama untuk daerah yang sudah mendapatkan pelatihan konstruksi bangunan jamban dan tangki septiknya.

Rantai pasok

Di Kabupaten Padang Pariaman, pihak aktor rantai pasok yang diwawancarai pada umumnya merupakan toko-toko bangunan yang menyediakan bahan-bahan bangunan secara umum yang termasuk bahan-bahan untuk pembuatan jamban dan tangki septik, serta wirausaha sanitasi yang berada di kabupaten Padang Pariaman, yang kebanyakan mencakup juga produksi dudukan jamban. Konsumen yang biasanya membeli dari aktor rantai pasok tersebut adalah kontraktor serta masyarakat umum. Cakupan penjualan pada umumnya adalah dalam kecamatan, beberapa juga mencakup dalam kabupaten serta kabupaten tetangga sekitarnya.

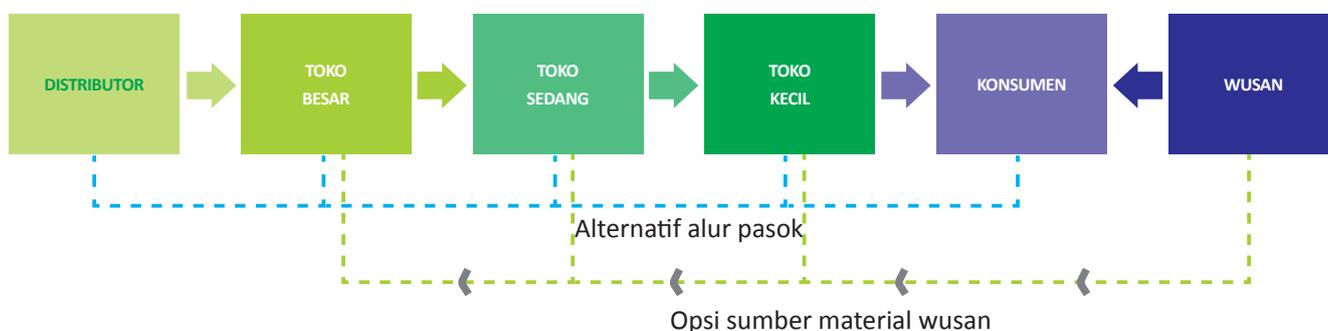
Berdasarkan hasil diskusi, warga mengumpulkan material secara lokal dari sungai sekitar dan membeli bahan lainnya dari toko bangunan. Beberapa bahan bangunan yang dibutuhkan untuk membangun jamban, terdapat pada Tabel 3. Sebisa mungkin, warga mengupayakan pemanfaatan sumber daya yang bisa mereka dapatkan secara cuma-cuma dari alam, dan jika tidak mencukupi maka barulah mereka membeli ke toko bahan bangunan.

Tabel 3 Material dibutuhkan untuk pembangunan jamban, Padang Pariaman

Material	Asal material
Batu	Sungai
Pasir	Sungai
Kerikil	Sungai
Batu bata	Toko bangunan
Dudukan jamban	Toko bangunan
Semen	Toko bangunan
Seng	Toko bangunan
Pipa paralon dan aksesoris	Toko bangunan

Untuk pengadaan bahan bangunan, aktor rantai pasok memiliki peranan yang penting. Bahan-bahan bangunan yang diproduksi harus melewati distributor, agen perantara lainnya, sebelum sampai ke toko bangunan yang akhirnya dibeli oleh konsumen dalam skala besar maupun skala kecil yang sebagian besar merupakan warga. Dalam penelitian kali ini, pihak aktor rantai pasok yang diwawancarai adalah beberapa distributor, toko-toko bangunan, serta wirausaha sanitasi yang berada di Kabupaten Padang Pariaman. Hubungan antara aktor rantai pasok dalam pengadaan barang ke konsumen/warga dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6 Hubungan antar aktor rantai pasok, kab. Padang Pariaman



Tabel 4 Jenis aktor rantai pasok, kab. Padang Pariaman

Aktor Rantai Sanitasi	Jenis Produk dan Layanan	Pemasok dan Lokasi layanan
Distributor	Pemesanan material bangunan/konstruksi seperti besi, pipa, semen, dudukan jamban.	Material pada umumnya didatangkan dari P. Jawa dan beberapa kota di Sumatra. Melayani kebutuhan kota provinsi dan kabupaten
Toko bangunan besar	Bervariasi biasanya melayani hampir semua material.	Material didatangkan dari Distributor di kota. Melayani pembelian di kota kabupaten maupun kecamatan.
Toko bangunan sedang	Bervariasi. Ada toko yang hanya secara khusus menjual pipa/besi/semen.	Material didatangkan dari Toko Besar atau langsung dari distributor dan kota-kota lainnya. Melayani pembelian di kecamatan-kecamatan
Toko bangunan kecil	Material yang bervariasi namun dalam jumlah terbatas. Tergantung permintaan masyarakat.	Material didatangkan dari kota. Melayani pembelian untuk nagari.
Wusan	Produksi dudukan jamban skala kecil dan jasa pembangunan jamban termasuk tangki septik.	Kecamatan dan nagari.

Produsen biasanya melakukan distribusi barang ke distributor maupun *supplier* besar lainnya. Distributor lalu akan menyimpan atau menjual barang dalam jumlah besar kepada toko-toko bangunan sebagai perantara untuk skala yang lebih kecil. Toko-toko bangunan yang kemudian akan menjadi perantara ke konsumen yang membutuhkan bahan-bahan tersebut. Pada kasus-kasus tertentu, distributor juga dapat menjadi penjual langsung kepada konsumen, dengan catatan konsumen tersebut membeli dalam jumlah yang cukup besar (biasanya untuk konsumen skala besar seperti kontraktor).

Sedangkan Wirausaha Sanitasi (WuSan) yang berada di kabupaten Padang Pariaman masih bergerak dalam skala kecil. Usaha-usaha sanitasi ini masih belum optimal melakukan pemasaran, dan biasanya mereka langsung menawarkan langsung kepada konsumen di sekitar mereka dalam skala nagari.

Distributor

Sebagian besar distributor berada di Kota Padang. Distributor pada umumnya mendapatkan barang dari Pulau Jawa, dan dijual untuk ke kabupaten/kota yang berdekatan dengan lokasi mereka di Padang. Mereka mendapatkan barang secara grosir yang kemudian dijual kembali sesuai harga pasaran. Adapun distributor dapat memberikan keringanan baik memberikan diskon harga produk atau memberi sisa kelebihan produk. Namun biasanya distributor tidak melayani sistem kredit.

Produk yang dijual oleh distributor biasanya berupa alat dan bahan bangunan secara umum, seperti besi, baja, plat, pipa PVC, termasuk dudukan jamban jongkok dan duduk beserta dengan peralatannya. Di beberapa toko besar/distributor di Kota Padang, mereka melayani pengaduan saat penerimaan barang jika ada kerusakan dan menjamin garansi barang dari toko serta dari pabrik. Apabila ada barang cacat, maka dapat diganti langsung saat diterima.

Distributor di Kota Padang secara umum melayani kawasan sekitar Kota Padang. Distributor yang ditemui menyatakan biasanya mereka menjual kepada toko-toko bangunan di sekitar kawasan (Kota Padang dan sekitarnya), maupun konsumen-konsumen yang membeli dalam jumlah besar yang biasanya warga kelas menengah ke atas. Pada umumnya distributor sudah terkenal dan memiliki jaringan tersendiri sehingga tidak lagi melakukan pemasaran lagi secara personal. Terdapat distributor yang menyediakan jasa transportasi, namun umumnya konsumen yang berasal dari luar kota biasanya mengurus transportasi dari pihak mereka.

Distributor juga mengakui tidak mengalami kendala berarti dalam penyediaan material. Mereka cenderung jarang mengalami kekurangan persediaan bahan; mungkin hanya sekitar satu kali dalam kurun waktu satu tahun. Untuk akses terhadap kredit, bisnis dalam skala ini dapat menggunakan pinjaman skala besar yang ditawarkan institusi keuangan secara umum.

Toko bangunan

Terdapat beberapa skala yang bervariasi untuk toko bangunan. Toko bangunan skala kecil biasanya hanya melayani tingkat desa dan sekitarnya. Toko bangunan dengan skala yang lebih besar dapat melayani dalam kecamatan dan sekitarnya hingga kabupaten tetangga jika dibutuhkan. Selain itu, toko bangunan juga biasanya menjual untuk usaha yang lebih kecil, kontraktor (borongan) atau warga/individu sebagai konsumen akhir.

Untuk toko-toko bangunan yang diwawancarai di Kabupaten Padang Pariaman, toko bangunan ini menyediakan barang seperti semen, besi, *kalsiboard*, tripleks, dan bahan-bahan lainnya termasuk beberapa produk sanitasi seperti jamban dan alat pendukungnya. Konsumen-konsumen dari toko bangunan ini sebagian besar merupakan bisnis yang memiliki skala lebih kecil, atau berperan sebagai distributor dengan skala lebih kecil. Cakupan penjualan pada umumnya adalah di sekitar nagari dan kecamatan, dan ada yang mencakup luar kecamatan seperti ke Kota Padang dan Padang Panjang. Salah satu toko yang diwawancarai juga menawarkan jasa membangun dan kontraktor secara umum.

Pada umumnya, usaha-usaha di Padang Pariaman tidak menawarkan layanan purna-jual. Untuk salah satu toko yang diwawancarai, mereka menyatakan sebatas hanya memberi rekomendasi untuk bahan maupun barang yang diperlukan untuk perbaikan atau perawatan jamban.

Untuk toko-toko bangunan yang diwawancarai, harga-harga barang ditetapkan sesuai harga pasaran. Hal ini dilakukan untuk menjaga persaingan sehat antar toko, serta memastikan pelanggan mau tetap berlangganan di toko-toko mereka.

Menyangkut ketersediaan barang, toko-toko bangunan menyatakan kadang mereka mengalami kekurangan bahan. Untuk toko bangunan yang diwawancarai, mereka menyatakan proses pemesanan dari pemasok dan distributor bisa memakan waktu antara 3-7 hari, sehingga rentan untuk kekurangan jika persediaan tidak diatur dengan baik. Biasanya mereka bekerja sama dengan toko-toko yang terdekat dengan kawasan sekitar untuk saling melengkapi bahan-bahan bangunan.

Untuk penggunaan modal tambahan, salah satu toko bangunan yang diwawancarai menyatakan, apabila ada tambahan modal seperti dalam bentuk investasi pribadi, maka lebih cenderung digunakan untuk menambah kapasitas persediaan barang. Untuk melakukan penyediaan/input barang secara kredit atau dari pinjaman, toko bangunan tidak mengajukan karena beranggapan bunga kredit masih tinggi.

Dalam menjangkau konsumen-konsumen baru, biasanya toko-toko bangunan (terutama di wilayah desa/nagari) mengandalkan rekomendasi dari mulut ke mulut. Untuk pelanggan lama atau sudah dikenal, toko-toko bangunan tersebut juga terkadang dapat memberi hutang terhadap konsumen lebih dahulu. Proses cicilan antara konsumen dan toko bangunan juga bisa dilakukan sesuai perjanjian di awal diantara keduanya.

Wirausaha sanitasi (Wusan)

Di Kabupaten Padang Pariaman, terdapat beberapa bisnis kecil yang bergerak di bidang sanitasi. Pada penelitian ini, ada 2 wusan yang diwawancarai di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu produsen dudukan jamban dan usaha jasa pembangunan jamban. Di Kecamatan Nan Sabaris (Nagari Kurai Taji), terdapat bisnis yang bergerak di bidang produksi dudukan jamban. Konsumen untuk usaha ini umumnya masih berada di dalam kecamatan serta beberapa kecamatan sekitar, sedangkan di Nagari Sikucua Barat, terdapat pula usaha jasa pembangunan khusus jamban.

Sebagai bagian dari program kerja untuk menghentikan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dari pemerintah nasional, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman pernah melakukan pelatihan teknis keterampilan pembuatan dudukan jamban dan pembangunan bangunan jamban di beberapa desa di Kabupaten Pariaman yang diorganisir sanitarian dari masing-masing desa.

Setelah mendapatkan dorongan dari pemerintah berupa modal keterampilan, wusan memproduksi dudukan jamban yang berada di Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris ini melihat adanya potensi pasar yang bisa dimasuki untuk dudukan jamban. Mereka melihat dudukan jamban tanpa merek di pasaran bisa mencapai Rp120.000,00. Mereka menilai bahwa dudukan jamban produksi mereka memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih tahan lama, dan mereka juga dapat menjual dengan harga yang lebih murah.

Gambar 7 Model dudukan jamban yang diproduksi di Kec Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman



Pengusaha produksi dudukan jamban menyatakan bahan yang dibutuhkan untuk usahanya cukup murah. Adapun rincian biaya bahan pembuatan dudukan jamban dapat dilihat pada Tabel 5. Menurut pengusaha produksi dudukan jamban ini, usahanya tersebut cukup menguntungkan, dengan profit margin hingga Rp 45.000,00 per dudukan jamban. Produsen dudukan jamban menjual produknya seharga Rp75.000,00 per unit. Menurut pengusaha produksi dudukan jamban ini, omset bulanan berkisar antara Rp1.000.000,00 s.d. Rp3.000.000,00 per bulan. Jumlah dudukan jamban yang terjual dapat diperkirakan (dengan harga Rp75.000,00 per unit) sebanyak 10-40 unit per bulannya. Di awal memulai usaha, usaha ini pernah meminjam dari bank BRI sejumlah Rp5.000.000,00 dan sudah dikembalikan dalam 1 tahun.

Untuk persediaan bahan produksi dudukan jamban, umumnya bahan baku dan komponen bisa didapatkan sepanjang tahun dari toko bangunan skala besar sampai kecil, dan produksi lancar selama cuaca mendukung. Namun kelayakan dari bisnis wusan ini masih perlu dipelajari lebih lanjut karena produksi yang cenderung masih tidak stabil. Beberapa kendala yang memengaruhi hal ini diantaranya adalah jumlah cetakan yang dirasakan masih kurang dan harus dibeli dari Pulau Jawa. Produsen dudukan jamban menyatakan mereka pernah mencoba membuat cetakan sendiri, tetapi gagal. Hal ini dapat dikembangkan jika mereka mendapatkan pelatihan untuk membuat cetakan yang baik.

Tabel 5 Rincian Biaya Bahan Baku Produksi dudukan jamban, Padang Pariaman

Material	Harga	Keterangan
Semen	Rp 60.000,- per sak	Untuk produksi 12 jamban
Pasir	Rp 1.500.000,-	Untuk bahan produksi ± 1 tahun
Cetakan	Rp 600.000,- per unit + ongkir Rp50.000,-	Ada 4 unit untuk produksi dudukan jamban
Cat khusus	Rp100.000,- per tabung 0,6L	Produksi dengan 4 warna berbeda

Selain itu, terdapat pula kendala dimana tenaga kerja dan tempat masih terbatas hingga jumlah produksi masih rendah dan belum optimal. Produksi dudukan jamban cenderung masih statis dengan konsumen datang langsung ke toko. Sejauh ini bisnis produksi dudukan jamban ini belum giat melakukan pemasaran dan belum ada usaha khusus untuk menjangkau konsumen baru. Produsen masih cenderung hanya menunggu konsumen yang datang dan mengandalkan promosi dari mulut ke mulut.

Kapasitas produksi yang mereka rasa masih terbatas membuat mereka juga ragu apabila mereka giat melakukan pemasaran, ada kekhawatiran produksi belum bisa memenuhi permintaan tambahan. Perlu ada tindak lanjut seperti pengawasan dan pendampingan guna memperbesar kapasitas sumber daya untuk meningkatkan produksi, serta pendampingan dalam pemasaran terutama untuk memasarkan produk jamban tersebut ke aktor pemasok sanitasi yang sudah ada terlebih dahulu seperti ke toko-toko bangunan.

Selanjutnya, terdapat pula pengusaha bisnis sanitasi di Sikucua Barat yang merupakan bisnis konstruksi yang juga fokus menawarkan usaha pembangunan jamban. Usaha ini menawarkan pelayanan pembangunan jamban secara borongan, mulai dari bahan-bahan bangunan, transportasi ke lokasi pembangunan/rumah warga, serta jasa konstruksi jamban (termasuk tangki septik). Mereka menawarkan paket harga sesuai besar jamban yang akan dibangun. Usaha ini masih tergolong skala kecil, melayani hanya dalam lingkup Nagari Sikucua Barat dan nagari-nagari yang berdekatan.

Pengusaha/kontraktor pembangun jamban mengatakan bahan yang diperlukan untuk usahanya tergolong tidak mahal. Apabila bahan kurang, biasanya konsumen yang akan menambah bahan. Rincian biaya bahan-bahan dan jasa pembangunan jamban dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Rincian Biaya Pembangunan Jamban, Padang Pariaman

Material/Jasa	Harga
Jamban + tangki septik	Rp700.000,-
Pipa	Rp80.000,-
Upah pasang	Rp250.000,-

Bisnis sanitasi ini juga menyediakan pelayanan untuk pembuatan jamban secara borongan. Wusan ini memasang harga borongan sebesar Rp1.150.000,00 - Rp2.300.000,00 per unit jamban, tergantung besar jamban yang akan dibangun. Luas jamban dan harga borongan masing-masing secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7. Bisnis ini masih mencakup wilayah Nagari Sikucua Barat dan sekitarnya. Sulitnya akses di Nagari Sikucua Barat juga dapat menjadi tantangan dalam pengadaan bahan-bahan.

Tabel 7 Penawaran Harga Pembangunan Jamban Borongan, Padang Pariaman

Paket Jamban (Luas Jamban)	Harga
2m x 1m	Rp1.150.000,-
2m x 2m x 1m	Rp1.650.000,-
3m x 1m	Rp1.900.000,-
3m x 3m x 1m	Rp2.300.000,-

Dukungan untuk aktor rantai pasok: Sejauh ini, peminjaman ke bank dilakukan sebatas untuk aktivitas dan modal permulaan, dan sebisa mungkin langsung dikembalikan oleh pengusaha. Para pengusaha, terutama toko bangunan sebagian besar belum memfokuskan untuk pengadaan pembangunan jamban. Mereka cenderung menjual bahan bangunan secara umum. Apabila pemilik toko bangunan juga membuat fokus khusus untuk usaha atau mempunyai rekan untuk usaha sanitasi, hal ini berpotensi memberi keuntungan untuk kedua belah pihak. Toko bangunan dapat menjual lebih banyak segmen jamban mulai dari kualitas pabrik sampai kualitas industri rumah tangga dengan harga yang lebih murah, dan konsumen atau warga sebagai pihak yang membayar untuk pembangunan jamban bisa mendapatkan harga yang lebih bervariasi dan opsi lebih murah.

Rantai pasok secara umum: Konsumen yang ditemui dalam penelitian secara umum tidak ada yang menyatakan terdapat kekurangan dalam penyediaan bahan bangunan, terutama untuk pembangunan jamban. Adanya toko maupun penyedia skala kecil dalam nagari yang dilihat dari observasi lapangan, juga membuktikan adanya jangkauan hingga nagari untuk bahan bangunan. Akan tetapi, usaha yang memfokuskan diri di bidang sanitasi di Kabupaten Padang Pariaman masih cenderung sedikit. Masih sedikitnya permintaan akan produk-produk sanitasi tersebut bisa menjadi salah satu hambatan berkembangnya usaha-usaha sanitasi di Kabupaten Padang Pariaman.

Selain itu, dari penelitian dapat terlihat ada potensi untuk wusan melakukan kemitraan dengan distributor dan toko bangunan besar. Wusan dapat memasok barang hasil produksinya ke toko bangunan atau distributor rekanan. Namun, hal ini perlu diimbangi dengan adanya pengembangan kapasitas untuk memenuhi permintaan pada wusan. Di samping itu, perlu juga ada pemicu bagi masyarakat guna meningkatkan permintaan akan pembangunan dan pemeliharaan jamban. Pada Gambar 8 dapat dilihat penyebaran aktor rantai sanitasi di Kabupaten Padang Pariaman yang didapatkan dari data primer berupa wawancara dan kunjungan langsung, serta data sekunder. Berdasarkan kumpulan data tersebut, terlihat sebagian besar toko bangunan terdapat di jalur

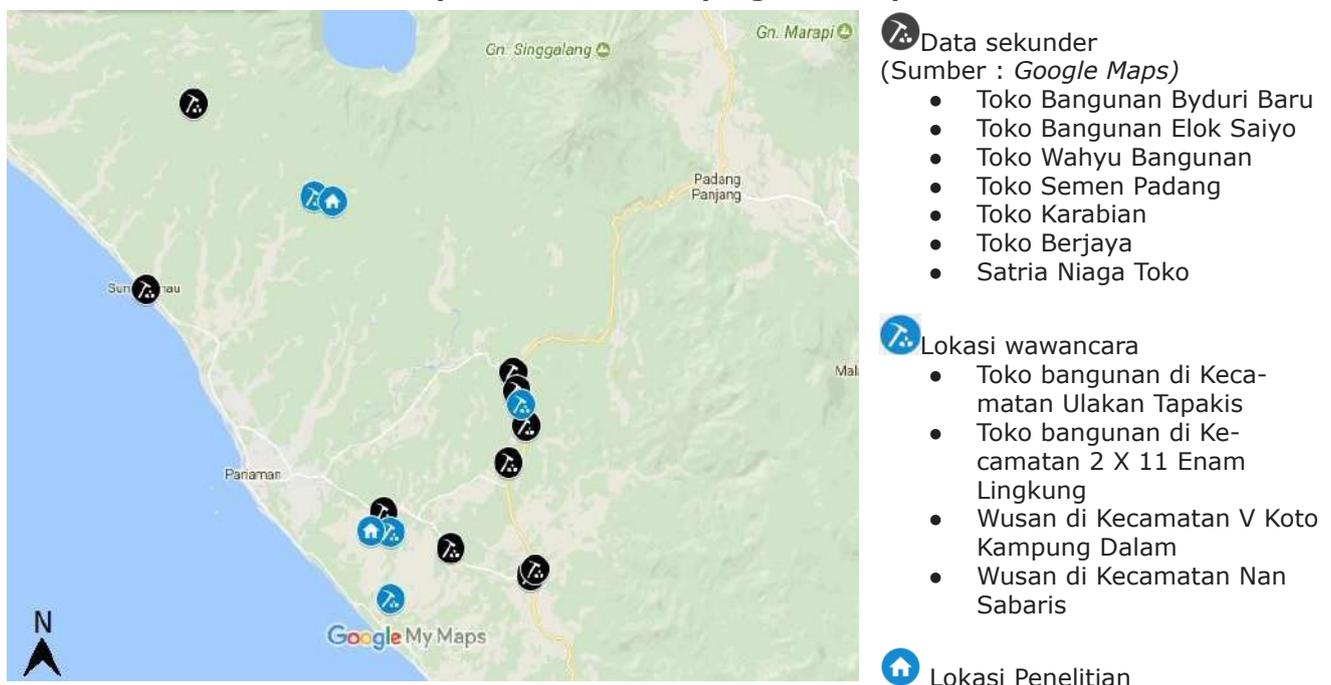
lintas Sumatera. Namun, sebaran yang ada dirasa masih cukup untuk menjangkau seluruh area Padang Pariaman. Berdasarkan data ini dan hasil wawancara dengan masyarakat (yang sebagian besar menyatakan hampir tidak pernah mengalami kesulitan dalam memperoleh barang dan bahan bangunan), dapat dispekulasikan bahwa sebaran toko-toko bangunan di Kabupaten Padang Pariaman mampu memenuhi kebutuhan persediaan material bangunan.

Akan tetapi, tidak dapat disimpulkan jumlah aktor rantai sanitasi yang mampu memenuhi permintaan apabila terjadi kenaikan permintaan secara drastis di masa yang akan datang sebagai bagian dari proses usaha yang dilakukan untuk pencapaian target universal sanitasi pada 2019. Data permintaan bahan bangunan, jumlah toko bangunan dan jumlah wirausaha sanitasi belum dapat diproyeksikan secara keseluruhan terhadap perubahan tersebut.

Dukungan Lingkungan

Institusi keuangan: Institusi keuangan dapat membantu pembangunan dengan menawarkan produk-produk pinjaman, baik kepada pihak komersil seperti usaha-usaha atau kepada masyarakat secara umum yang sesuai kapasitas institusi maupun peminjam. Institusi keuangan berpotensi mempercepat pencapaian akses sanitasi terutama dengan pendekatan non-hibah dengan menawarkan produk-produk yang memberi keringanan untuk usaha-usaha yang bergerak di bidang sanitasi maupun warga yang ingin segera membangun jamban tetapi belum memiliki dana yang cukup. Beberapa institusi keuangan yang kami temui di wilayah Kabupaten Padang Pariaman antara lain adalah BAZNAS, BPR, serta bumi nagari setempat.

Gambar 8 Sebaran Rantai Aktor Sanitasi (Toko Bangunan) di Kabupaten Padang Pariaman (berdasarkan data yang tersedia)



Pihak BAZNAS yang ditemui belum melayani peminjaman secara spesifik untuk sanitasi. Namun, ada bantuan untuk pembangunan rumah sehat. Konsumen-konsumen BAZNAS berasal dari masyarakat umum, dengan kriteria sebagai berikut:

- Pengelolaan wajib zakat dari PNS (pemerintah) 2,5% per bulan dari gaji. Dari total pengumpulan zakat, sebanyak 35% di antaranya dialokasikan untuk Pendidikan.
- Sebanyak 12% untuk kesehatan (ditargetkan terutama untuk masyarakat yang belum memiliki BPJS)

Pembiayaan BAZNAS lainnya, salah satunya adalah program "Rumah layak huni" (masyarakat perekonomian rendah) yang jika memang aspek sanitasi belum memadai, bisa dibantu. Akan tetapi, untuk program spesifik seperti sanitasi belum ada program yang membantu pengadaan jamban untuk rumah tangga secara umum.

Menurut BAZNAS, ada beberapa tantangan untuk mendukung pengembangan akses sanitasi diantaranya:

- Rencana koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan mengenai skema seperti apa yang nanti akan bisa didukung untuk pengembangan akses sanitasi dan program STBM.
- Pertimbangan bantuan usaha lebih fokus karena alasan ekonomi (kriteria untuk bantuan-bantuan usaha kecil/UKM; termasuk juga ke depannya untuk wirausahawan sanitasi).

Selanjutnya, untuk institusi keuangan lainnya adalah BPR. BPR memberi pinjaman secara umum di sektor perdagangan, baik dari skala kecil sampai besar di sekitar kawasan kantor BPR tersebut. Minimum peminjaman adalah sejumlah Rp3.000.000,00. Produk peminjaman ada yang dibawah Rp10.000.000,00 untuk kredit usaha kecil, dan di atas Rp10.000.000,00 untuk kredit usaha umum. Di sekitar BPR belum ada usaha spesifik sanitasi, sehingga BPR belum memiliki produk spesifik untuk sanitasi. BPR dapat meminjamkan kepada usaha sanitasi sebagai modal kerja, tapi mereka harus mempertimbangkan potensi pengembalian usaha tersebut.

Sebagai gambaran, skema kredit peminjaman BPR dapat dilihat pada Tabel 8. Suku bunga yang digunakan adalah sebesar 8,25% untuk Bank Perkreditan Rakyat sesuai ketentuan Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan Periode Januari 2018 yang ditentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dengan jumlah pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 dalam jangka waktu 12 bulan dengan bunga 8,25% per tahun (cicilan dibayar per bulan dan perhitungan bunga dilakukan secara anuitas):

Tabel 8 Skema Kredit Angsuran Peminjaman BPR

Periode	Angsuran Bunga	Angsuran Pokok	Total Angsuran	Sisa Pinjaman
Feb 2018	0	0	0	Rp10.000.000,00
Mar 2018	Rp68.750,00	Rp802.290,63	Rp871.040,63	Rp9.197.709,37
Apr 2018	Rp63.234,25	Rp807.806,38	Rp871.040,63	Rp8.389.902,99
Mei 2018	Rp 57.680,58	Rp813.360,05	Rp871.040,63	Rp7.576.542,94
Jun 2018	Rp 52.088,73	Rp818.951,90	Rp871.040,63	Rp6.757.591,04
Jul 2018	Rp 46.458,44	Rp824.582,19	Rp871.040,63	Rp 5.933.008,85
Aug 2018	Rp 40.789,44	Rp830.251,20	Rp871.040,63	Rp 5.102.757,65
Sep 2018	Rp 35.081,46	Rp835.959,17	Rp871.040,63	Rp 4.266.798,48
Okt 2018	Rp 29.334,24	Rp841.706,39	Rp871.040,63	Rp 3.425.092,09
Nov 2018	Rp 23.547,51	Rp847.493,12	Rp871.040,63	Rp 2.577.598,97
Des 2018	Rp 17.720,99	Rp853.319,64	Rp871.040,63	Rp 1.724.279,33
Jan 2019	Rp 11.854,42	Rp859.186,21	Rp871.040,63	Rp 865.093,12
Feb 2019	Rp 5.947,52	Rp865.093,12	Rp871.040,63	Rp -0,00
Total	Rp 452.487,58	Rp10.000.000,00	Rp 10.452.487,58	

Institusi lain yang merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk pengembangan desa adalah Bumdes/BUM Nag yaitu Badan Usaha Milik Nagari. BUM Nag salah satunya dapat digunakan untuk melayani simpan pinjam, jasa pelayanan pembayaran rekening & kredit, serta dapat pula mengembangkan usaha untuk produk-produk grosir ataupun jasa lainnya. Pelayanan simpan pinjam di BUM Nag biasanya digunakan oleh masyarakat sekitar dan juga pedagang eceran atau skala kecil. BUM Nag melayani simpan pinjam dengan jumlah maksimal Rp5.000.000,00.

Dalam hal pengadaan produk pinjaman untuk sanitasi, BUM Nag melihat tantangan berupa keengganan masyarakat menggunakan jamban dan tangki septik, serta air bersih yang cenderung susah sehingga masyarakat belum mau menggunakan dan membangun produk sanitasi seperti jamban. Selain untuk produk sanitasi, masih ada keterbatasan sumber daya serta dana untuk memperbesar kapasitas simpan pinjam. Namun, BUM Nag melihat kemungkinan kerja sama dengan toko bangunan dalam pengadaan jamban untuk produk pembiayaan sanitasi.

Pemerintah: Lembaga pemerintahan berperan penting dalam meningkatkan kondisi sanitasi masyarakat secara umum. Adanya pemerintah yang mendukung dapat mempercepat pembangunan, khususnya di bidang sanitasi. Pemerintah dapat mendukung program-program sanitasi terutama untuk kawasan terpencil, serta memperlancar kegiatan usaha yang berhubungan dengan wirausaha dan pembangunan jamban guna meningkatkan kondisi sanitasi.

Di nagari, kesehatan lingkungan dicoba ditingkatkan dengan adanya pembinaan, penyuluhan, serta gotong royong untuk membangun fasilitas sanitasi. Petugas kesehatan lingkungan (kesling) dari Puskesmas melakukan pemicuan/pengajakan yang dilakukan dengan berbagai aktivitas termasuk juga media seperti *leaflet* dan gambar. Dalam hal ini, aktivitas yang paling banyak dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah pemicuan sebagai bagian dari proses perubahan perilaku yang ditekankan oleh program STBM. Pemicuan dilakukan oleh dan untuk masyarakat dengan mengumpulkan masyarakat di tingkat nagari maupun kecamatan dan melakukan aktivitas dan permainan yang dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya sanitasi. Kegiatan ini biasanya diinisiasi oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

Inisiasi masyarakat: Di kedua nagari yang didatangi di Kabupaten Padang Pariaman, belum ada arisan jamban yang optimal dilaksanakan. Di Nagari Pauh Kamar, responden diskusi menyatakan arisan pernah dicoba untuk dilakukan, tetapi dalam prosesnya pembayaran macet (ada kendala dalam pembayaran). Sedangkan di Nagari Sikucua Barat, konsep arisan jamban pernah didengar oleh beberapa warga, akan tetapi belum pernah dilaksanakan.

Di samping itu, karena kesulitan akses jalan guna pembangunan serta perawatan jamban, hal ini membuat masyarakat masih mempertimbangkan untuk membangun tangki septik. Banyak dari masyarakat membangun jamban, namun buangnya disalurkan ke lubang atau sungai. Selain itu, mereka juga khawatir tidak ada truk penguras tinja yang mau datang ke nagari Sikucua Barat apabila tangki septik penuh. Di samping kendala finansial, akses jalan dan penyedotan tinja merupakan salah satu hambatan signifikan dalam pembangunan dan perawatan jamban.

Sijunjung

Di Kabupaten Sijunjung, tingkat kepemilikan jamban di kedua nagari yang ditemui bervariasi. Nagari Latang Kecamatan Lubuk Tarok memiliki jumlah kepemilikan jamban yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Nagari Batu Manjulang Kecamatan Kupitan. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk yang sudah memiliki toilet. Di Nagari Batu Manjulang Kecamatan Kupitan, sebagian besar masyarakat sudah membangun dan masih terdapat sekitar 22 KK yang belum memiliki jamban (Data Responden Wawancara, 14 Oktober 2017), Sebaliknya di Nagari Latang, masyarakat masih ada yang melakukan buang air besar di sungai, namun sudah ada inisiatif untuk pengadaan jamban secara mandiri dengan mengadakan arisan jamban. Saat ini, warga yang tidak memiliki toilet menumpang di rumah tetangga, saudara atau ke sungai. Di malam hari, beberapa warga mengaku buang air besar dengan menggali lubang di sekitar rumah atau menampung di kantong plastik untuk kemudian dibuang.

Keinginan (Demand)

Keinginan: Dalam diskusi yang dilakukan bersama dengan masyarakat, diketahui bahwa masyarakat memiliki keinginan untuk membangun jamban. Adapun beberapa alasan yang dikemukakan masyarakat mengenai keinginan membangun jamban adalah:

1. Ekonomi: Sudah punya biaya dan uang untuk membangun jamban.
2. Kebersihan: dapat mencuci pakaian di kamar mandi, lebih mudah mengambil air untuk mencuci piring.
3. Privasi dan keamanan: Kenyamanan terjamin terutama untuk anak-anak, perempuan dan lansia.

Susah..Susah bu, kalau kebelet malam
(Warga FGD Nagari Batu Manjulang)

4. Etika dan estetika: adanya perasaan malu terhadap tamu terutama teman dari anak-anak.
5. Sumber air sudah memadai.

Menurut sanitarian dan bidan di kedua nagari di Kabupaten Sijunjung, masyarakat sudah memahami pentingnya memiliki jamban di rumah. Salah satu faktor yang mendorong pemahaman warga adalah pemucuan yang dilakukan selama berinteraksi dengan warga.

Informasi tentang sanitasi di tingkat Nagari Batu Manjulang selalu diberikan oleh sanitarian dan bidan baik saat kunjungan ke rumah maupun saat interaksi dalam kegiatan nagari. Meskipun demikian, masih ada warga yang belum memiliki jamban walau jumlahnya sangat kecil yaitu sebanyak 22 keluarga. Bidan nagari di Latang juga aktif melakukan pemucuan dan sosialisasi pengadaan jamban (arisan jamban) pada kegiatan Posyandu dan rapat desa. Meskipun pemucuan secara massal belum dilakukan, diakui oleh sanitarian dan bidan desa, pemucuan berhasil meningkatkan keinginan untuk membangun toilet, terutama di Nagari Latang sehingga muncul inisiatif bersama untuk membangun jamban.

Di Nagari Batu Manjulang, sebagian besar warga sudah memiliki jamban. Jamban yang dibangun sebagian besar merupakan sumbangan dari pemerintah dan anggota dewan rakyat. Sehingga tidak dapat dipastikan apakah tingginya angka kepemilikan jamban disana adalah merupakan hasil dari perubahan perilaku.

Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, masyarakat tidak mau memiliki toilet bukan karena tidak mampu, namun lebih disebabkan karena masalah prioritas dan kebiasaan. Seharusnya, untuk sanitasi, setiap keluarga sudah harus punya jamban, akses ke air bersih dan pembuangan ke tangki septik. Namun di beberapa daerah akses air bersih masih sulit, sehingga pembuangan tetap ke sungai walaupun sudah terpasang jamban di rumah. Selain itu, menurutnya masyarakat cenderung memiliki persepsi tentang kenyamanan untuk BABS di sungai karena faktor persepsi seperti tidak kepanasan dan sejuk. Sungai juga berada dekat dengan lokasi rumah sehingga warga lebih memilih untuk ke sungai (Gambar 9). Pada saat pengambilan data, tim juga masih menemukan warga yang praktik buang air besar di sungai.

Malu dengan tamu apabila tidak ada WC. Anak-anak juga suka meminta, mereka malu apabila teman main ke rumah, dan di rumah tidak ada WC.

(Warga FGD Nagari Latang)

Ada WC tapi ndak ado air

(Warga FGD Nagari Latang)

Kemauan untuk membayar: Adapun peserta diskusi juga mengemukakan kesulitan yang dihadapi ketika akan membangun toilet yaitu:

1. Biaya pembangunan toilet tidak terjangkau/mahal. Peserta diskusi mengaku bahwa penghasilan mereka tidak menentu per hari sehingga prioritas diutamakan untuk kebutuhan ekonomi. Beberapa warga sudah tinggal sendiri (janda) dan ditinggal oleh anak atau saudara karena bekerja.
2. Tempat tinggal yang berada di tepi tebing dan tidak rata menyebabkan biaya pembangunan menjadi lebih tinggi.
3. Air PDAM tidak masuk sampai ke daerah peserta diskusi.
4. Tendensi untuk menunggu sampai bisa membangun rumah yang lebih bagus.

Gambar 9 Sungai yang mengairi Nagari Latang Kabupaten Sijunjung



**Arisan jamban...
Dulu uda dibilang
sama ibu itu
(bidan) tapi tidak
mencukupi, tidak
sanggup kami**

(Warga FGD Nagari Latang)

Sanitarian di Nagari Batu Manjukur, mengakui bahwa kebanyakan warga terkendala masalah ekonomi. Sebagai contoh, 22 KK yang belum memiliki jamban di Nagari Batu Manjukur, sebagian besar memang kelompok masyarakat yang sudah paling tidak mampu untuk membangun jamban. Arisan jamban sudah pernah dianjurkan sebesar Rp10.000,00/ minggu. Namun tidak berjalan karena masyarakat menganggap hal tersebut masih memberatkan. Hal ini disebabkan penghasilan masyarakat yang kecil, bervariasi mulai dari Rp1.000.000,00-Rp2.000.000,00 per bulan. Penghasilan ini dibagi per hari untuk kepentingan makan, sekolah anak dan transportasi.

Di Nagari Latang, masyarakat setempat mengenal adanya arisan jamban di bawah koordinasi badan desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari. Program ini cukup berhasil, karena sepuluh anggota pertama arisan berhasil membangun jamban. Arisan jamban dilakukan per minggu dengan besaran Rp20.000,00 pada pertengahan 2016-2017. Saat ini arisan tersebut masih vakum karena belum banyak anggota baru yang mendaftar. Adapun upaya yang dilakukan dalam menjaring anggota baru tetap dilakukan dengan melakukan sosialisasi program arisan jamban pada saat kegiatan Posyandu dan kegiatan masyarakat lainnya. Dalam wawancara FGD yang dilakukan dengan kelompok wanita yang tidak memiliki jamban di nagari tersebut, mereka mengaku belum bergabung dengan arisan jamban karena khawatir pembayaran per minggu akan macet jika tidak dapat membayar tepat waktu.

Masyarakat yang ditemui di kedua nagari mengaku merasa kesulitan untuk menabung apalagi khusus untuk membangun jamban. Warga berpersepsi bahwa membutuhkan biaya besar dalam rentang Rp3.000.000,00-5.000.000,00 untuk hal itu. Perkiraan biaya tersebut sudah termasuk pembuatan tangki septik. Untuk mengurangi biaya, warga dapat mengambil material dari sungai seperti batu, pasir dan kerikil sehingga biaya lebih murah. Namun, salah satu faktor yang harus dipertimbangkan adalah keadaan alam. Di Batu Manjukur sebagai contoh, keadaan tanahnya terjal dan bertebing sehingga diperlukan perataan tanah terlebih dahulu. Perataan ini lah yang biasanya membutuhkan biaya tambahan. Sehingga dalam hal ini, masyarakat sangat membutuhkan pelatihan mengenai pembangunan jamban yang terjangkau dan opsi teknologi tepat guna untuk daerah yang cenderung lebih sulit (co: terjal, bertebing, rawa, area banjir, atau tingginya muka air tanah).

Untuk melakukan penghematan dan kemudahan terhadap material dalam pembangunan jamban, maka warga mengerjakan pembangunan jamban secara bergotong royong, terutama dalam keanggotaan arisan jamban. Warga mendapatkan dukungan dari pemasok desa dalam kemudahan mendapatkan material yang dibutuhkan. Kemudahan tersebut membuat warga menjadi lebih bersemangat dalam membayar arisan jamban.

Untuk alternatif pembiayaan membangun produk sanitasi diantaranya adalah Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag). Lembaga tersebut merupakan lembaga milik masyarakat dan pemerintah nagari yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nagari, pendapatan masyarakat dan pendapatan asli nagari. Saat ini, usaha-usaha dalam BUM Nag Nagari Batu Manjukur sudah dijalankan dan fokus pada peningkatan ekonomi diprioritaskan untuk usaha perdagangan, kredit, pengadaan air, dan garmen. Sanitasi tidak masuk secara khusus dalam fokus BUM Nag. Namun demikian, masyarakat dapat meminjam kredit untuk pembangunan jamban dan wirausaha sanitasi.

Akan tetapi, sampai saat ini warga belum memprioritaskan pinjaman dari BUM Nag untuk wirausaha sanitasi dan pembangunan jamban. Dalam penyusunan anggaran BUM Nag yang baru dibentuk pada Agustus 2017, usaha sanitasi juga belum menjadi prioritas juga di Nagari Latang. Usaha-usaha yang diprioritaskan oleh nagari adalah pertanian, perdagangan dan peternakan.

Rantai pasok

Aktor rantai pasok sanitasi yang diwawancarai di Kabupaten Sijunjung terdiri dari toko bangunan, pemasok (toko kecil) dan tukang. Untuk wirausaha sanitasi atau wusan, pada saat penelitian tidak ditemukan wusan yang masih aktif di wilayah Kabupaten Sijunjung walaupun pada waktu sebelumnya telah dilakukan pelatihan pembangunan jamban ke masyarakat. Baik toko bangunan dan *supplier* toko bangunan melakukan aktivitas penyediaan bahan baku, penjualan dan distribusi bahan ke konsumen. Konsumen rantai pasok biasanya terdiri dari kontraktor, tukang dan individu. Penjualan dilakukan di sekitar area toko, dalam kota dan kecamatan.

Berdasarkan hasil diskusi, diketahui bahwa warga membutuhkan material untuk membangun jamban seperti pada Tabel 9. Material tersebut ada yang dapat diusahakan sendiri dengan mengambil dari sungai dan juga membeli dari penyedia di desa atau toko bangunan di kota.

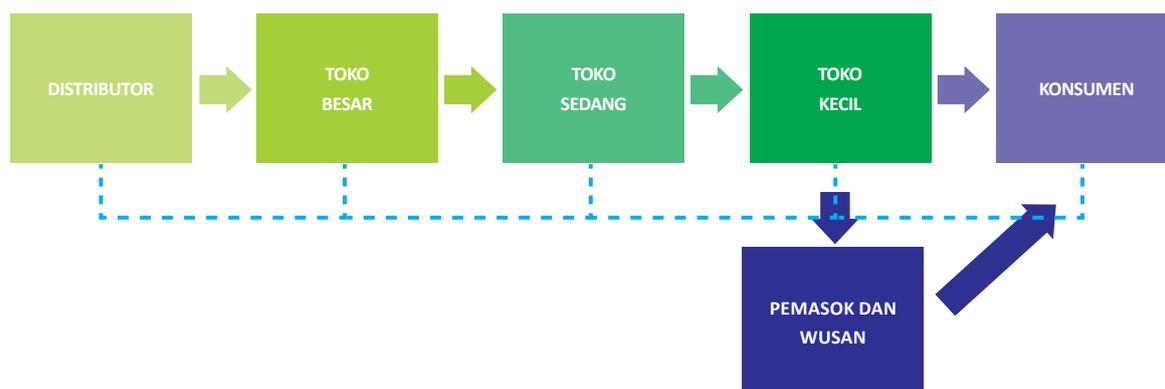
Tabel 9 Material dan produk yang harus disiapkan, Sijunjung

Material	Asal material
Batu	Sungai
Pasir	Sungai
Kerikil	Sungai
Dudukan jamban	Toko bangunan
Semen	Toko bangunan
Seng	Toko bangunan
Pipa	Toko bangunan

Untuk pengadaan bahan bangunan, aktor rantai pasok memiliki peranan yang penting. Bahan-bahan bangunan yang diproduksi harus melewati distributor, agen perantara lainnya, sebelum sampai ke toko bangunan yang akhirnya dibeli oleh konsumen dalam skala besar maupun skala kecil, yang sebagian besar merupakan warga. Namun, pembelian material di toko bangunan biasanya dilakukan secara terpisah oleh pemasok atau wusan yang datang dari kecamatan dan desa. Hal ini disebabkan tidak ada toko khusus yang menjual semua perlengkapan material untuk jamban di satu toko. Adapun pembelian semen dan dudukan jamban dilakukan di toko yang berbeda-beda.

Gambar 10 menunjukkan rantai pasok sederhana di Kabupaten Sijunjung yang terdiri dari distributor, toko bangunan, serta pemasok nagari dan wirausaha sanitasi di nagari. Tidak ada wirausaha sanitasi (wusan) yang ditemui secara khusus di kedua nagari di Kabupaten Sijunjung. Wusan di nagari tersebut mengalami kemacetan dalam pemodalannya dan pemasarannya. Namun tokoh wusan biasanya dapat dihubungi ketika ada permintaan untuk membangun jamban. Informasi detail lokasi dan layanan masing-masing aktor rantai sanitasi dapat dilihat pada Tabel 10.

Gambar 10 Hubungan antar aktor rantai pasok, kab. Sijunjung



Berdasarkan informasi warga dan Dinas Kesehatan Sijunjung, terdapat penyedia di level nagari yang aktif memberikan bantuan pembelian produk terkait sanitasi maupun lainnya seperti konstruksi yang biasa disebut pemasok nagari. Pemasok dengan sukarela menyiapkan segala kebutuhan masyarakat dalam membangun jamban tanpa dibayarkan terlebih dahulu. Pemasok tidak hanya menyediakan produk sanitasi melainkan secara keseluruhan kebutuhan penduduk nagari tergantung kebutuhan penduduk berdasarkan permintaan.

Distributor

Pemasok toko bangunan/distributor merupakan tempat pemasokan dan penjualan langsung bahan dan material bangunan baik kepada konsumen maupun toko-toko kecil lainnya di beberapa daerah lainnya seperti Solok dan Sawah Lunto. Lokasi distributor berada di Kota Padang dan sebagian besar tidak melakukan usaha periklanan atau promosi terkait dengan penjualan barang, melainkan hanya mengandalkan jaringan yang sudah terbentuk dan promosi dari mulut ke mulut. Biasanya konsumen yang datang merupakan pemilik usaha konstruksi atau toko bangunan di wilayah kecamatan dan nagari. Sebagian besar pembelian barang dilakukan dalam jumlah banyak untuk dijual kembali.

Tabel 10 Jenis aktor rantai pasok, kab. Sijunjung

Aktor Rantai Sanitasi	Jenis Produk dan Layanan	Pemasok dan Lokasi layanan
Distributor	Pemesanan material bangunan seperti besi, pipa, semen.	Material didatangkan dari P. Jawa dan beberapa kota di Sumatra. Melayani kebutuhan kota provinsi dan kabupaten.
Toko besar	Bervariasi biasanya melayani hampir semua material.	Material didatangkan dari distributor di kota. Melayani pembelian di kota kabupaten maupun kecamatan.
Toko sedang	Bervariasi. Ada toko yang hanya secara khusus menjual pipa/besi/semen.	Material didatangkan dari toko besar atau langsung dari distributor dan kota-kota lainnya. Melayani pembelian di kecamatan-kecamatan.
Toko kecil	Material yang bervariasi namun dalam jumlah terbatas. Tergantung permintaan masyarakat.	Material didatangkan dari kota. Melayani pembelian untuk nagari.
Pemasok nagari	Tergantung permintaan masyarakat. Material pesanan dipesan dahulu kemudian min 3 hari sudah didatangkan.	Material didatangkan dari kota. Melayani pembelian untuk nagari.
Wusan	Jamban dan Tangki Septik serta jasa tukang.	Kecamatan dan nagari.

Toko Besar

Dalam praktiknya, material/barang tidak langsung ada di tempat distributor, biasanya dipesan dahulu/disimpan di gudang di tempat yang berbeda. Material yang dipesan di distributor biasanya berupa pipa, seng, semen, paku dan besi yang didatangkan dari daerah di sekitar Padang dan Pulau Jawa. Lalu, konsumen dapat datang ke toko dan memesan barang sesuai kebutuhan dengan harga yang sudah ditentukan oleh distributor. Harga yang ditetapkan merupakan harga standar pasaran. Di sisi lain, jika konsumen yang membeli merupakan pelanggan yang sudah dikenal distributor, terkadang mereka dapat memberikan keringanan baik memberikan diskon harga produk atau memberi sisa kelebihan produk. Namun distributor tidak melayani sistem kredit.

Selanjutnya, terdapat distributor yang menyediakan jasa transportasi, tergantung permintaan dan juga melayani pengaduan jika barang yang dipesan rusak/cacat. Distributor mengaku tidak mengalami kendala berarti dalam penyediaan material kecuali pada saat hari raya. Secara umum, distributor dapat menyediakan semua kebutuhan konsumen dengan mudah dan permintaan konsumen dapat dipenuhi kecuali untuk permintaan produk sanitasi seperti dudukan jamban yang harus dicari di tempat yang berbeda. Terkait pemodalannya, distributor mengaku tidak mengalami

kesulitan berarti karena umumnya tidak ada kemacetan pembayaran dari konsumen. Sedangkan untuk bantuan pemodal usaha, pihak distributor tidak memberikan informasi yang cukup mengenai hal ini.

Toko bangunan

Terdapat beberapa skala toko bangunan yaitu besar, sedang, dan kecil. Toko bangunan yang ditemui merupakan toko bangunan sedang dan kecil yang berada di sekitar wilayah kecamatan yang dikunjungi. Toko bangunan skala sedang menyediakan dan menjual langsung bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, bata, pipa, besi, paku, pintu fiber, dudukan jamban atau jamban, seng, dan material lainnya kepada konsumen. Sedangkan untuk toko skala kecil, penyediaan material biasanya terbatas dan tergantung pesanan konsumen.

Toko bangunan skala sedang di Kabupaten Sijunjung mendatangkan material dari kota Padang maupun kota lainnya. Jamban didatangkan dari Pekanbaru, Sincang dan Payakumbuh. Pintu fiber didatangkan dari Padang dan Bukit Tinggi, serta batu bata didatangkan dari Batu Sangkar. Selain mengambil jamban dari toko dan distributor lebih besar, beberapa toko bangunan juga mengambil jamban yang di produksi dan dibuat dalam skala rumah tangga dengan rentang harga yang lebih murah.

Gambar 11 Hubungan antar aktor rantai pasok, kab. Sijunjung



Biasanya toko bangunan juga membantu konsumen menyediakan tukang untuk pengerjaan. Namun konsumen mengeluhkan biaya yang perlu dikeluarkan untuk biaya tukang, sekitar Rp200.000-300.000,00. Hal ini menyebabkan konsumen mengusahakan pengerjaan sendiri atau bersama-sama dengan kelompok kerja di nagari. Adapun harga yang dipatok oleh toko bangunan/distributor sesuai dengan harga pasaran umumnya sesuai Tabel 11.

Tabel 11 Rincian Biaya Pembangunan Jamban, kab. Sijunjung

Material	Harga
Semen	Rp. 65.000/sak
Pasir	Rp. 200.000/m ³
dudukan jamban	Rp. 120.000 - Rp. 320.000,00/bh
Pipa	Rp. 200.000 - 320.000/btg
Batako Bata merah	Rp. 625.000/250 bh 800/bh
Tangki septik	Rp. 500.000,00
Seng	Rp. 45.000,00/lembar

Untuk layanan purna jual, toko bangunan biasanya tidak memberikan jaminan untuk penukaran barang rusak. Namun jika terjadi kerusakan pada saat pengiriman dan terjadi pengecekan langsung di hari yang sama saat pengantaran barang maka material tersebut dapat diganti.

Mekanisme pembelian barang dilakukan pada saat konsumen datang ke toko dan membayar lunas pembelian material. Toko mengaku tidak melayani sistem kredit atau hutang dahulu untuk pembelian material. Konsumen yang datang ke toko biasanya merupakan individu, wusan dan penyedia di kecamatan dan nagari yang membeli kebutuhan konstruksi.

Toko juga tidak melakukan penjualan *door to door* dalam mempromosikan produknya. Hal ini berlaku untuk toko-toko besar di Kota Sijunjung. Salah satu toko bangunan di Kabupaten Sijunjung menyebutkan, bahwa biaya pembangunan jamban dan kamar mandi ber dinding bata sebesar Rp2.500.000,00. Toko bangunan yang ditemui juga pernah melayani masyarakat yang melaksanakan arisan jamban, tapi dikemudian hari proses ini tidak berjalan lancar (macet).

Dalam membantu jalannya usaha, toko bangunan juga melakukan pinjaman ke lembaga keuangan seperti bank dan Lembaga Keuangan Mikro di Kota Sijunjung. Namun, ada pemilik toko yang tidak menjadikan bank sebagai prioritas dalam usaha penambahan modal. Untuk toko besar, mereka sebagian besar melakukan penambahan modal dengan investasi pribadi dengan menambah kapasitas barang/ material yang dijual. Sedangkan untuk toko bangunan skala kecil, pemilik toko belum berani mengajukan pinjaman melalui bank. Hal ini disebabkan, pemilik toko merasa khawatir tidak mampu mengembalikan pinjaman. Prioritas penambahan modal dilakukan misalnya dengan menggadai atau menjual aset dan meminjam ke relasi.

Pemasok dan wusan

Di nagari di Kabupaten Sijunjung, terdapat pemasok dan wirausaha sanitasi (wusan). Pemasok biasanya melayani kebutuhan masyarakat nagari tergantung pemesanan. Usaha tersebut merupakan usaha pribadi yang sudah lama dijalankan. Wirausaha sanitasi (wusan) merupakan usaha mandiri yang dibentuk oleh individu/ kelompok yang bergerak di bidang sanitasi. Kemunculan wirausaha sanitasi juga dipicu oleh dorongan program pemerintah dalam pemerataan akses sanitasi kepada seluruh masyarakat dengan melibatkan pelatihan tentang usaha sanitasi. Wusan biasanya menjalankan usaha terkait sanitasi seperti pembuatan dudukan toilet dan pembangunan toilet. Pemasokan material dapat dilakukan sendiri atau melalui pemasok di nagari. Dalam hal ini pemasok dipisahkan dari definisi wusan karena pemasok juga melayani kebutuhan lain, dan tidak fokus hanya untuk jasa sanitasi.

Pemasok di desa, biasanya tukang, melakukan usaha konstruksi rumah maupun jamban. Masyarakat nagari biasanya sudah mengetahui pemasok tersebut sehingga apabila ada urusan pembangunan rumah maupun jamban, bisa memesan kepada pemasok. Tidak hanya menyediakan bahan bangunan melainkan semua pesanan masyarakat tergantung permintaan. Misalnya: pengangkutan hasil perkebunan (karet) ke kota dan penjualan kebutuhan sehari-hari.

Di Nagari Latang, pemasok juga membantu memperlancar proses arisan jamban di nagari. Pemasok mau membantu memberikan material terlebih dahulu tanpa pembayaran di muka. Secara umum, penyedia di nagari, mudah dihubungi (melalui panggilan telepon atau pesan singkat). Material yang dipesan akan disediakan dalam waktu tiga hari, dan sampai saat ini dapat memenuhi permintaan konsumen.

Tantangan yang dialami pemasok namun juga menjadi kemudahan bagi masyarakat adalah pembayaran dari masyarakat yang terlambat sedangkan pemasok harus tetap menyediakan uang pribadi/ modal untuk membelikan material yang dipesan. Pemasok menyarankan bahwa jika pemerintah atau komunitas ingin bekerja sama, dana pembangunan jamban bisa langsung dibayarkan pada pemasok terlebih dahulu sebagai modal untuk pembelian material.

Untuk wirausaha sanitasi di Kabupaten Sijunjung, pernah ada atas inisiatif dari pemerintah dan masyarakat. Beberapa warga diundang pemerintah untuk mendapatkan pelatihan mengenai wirausaha sanitasi. Namun, di Kabupaten Sijunjung khususnya di Nagari Latang, wirausaha sanitasi sudah mengalami kemacetan dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, selain wirausaha sanitasi tidak aktif dalam memasarkan produknya juga terdapat kendala dalam permodalan. Pengembalian modal menjadi terhambat karena kurangnya minat masyarakat untuk membangun jamban baik dengan membayar tunai ataupun mengangsur. Selain itu program yang diberikan oleh pemerintah terbatas pada pemberian keterampilan, sedangkan untuk pendampingan dan dorongan berwirausaha masih kurang intensif. Akses terhadap modal juga masih dirasa terbatas sehingga banyak wusan yang saat ini sudah tidak aktif.

Dukungan untuk aktor rantai pasok: Umumnya lembaga keuangan seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nagari Indonesia (BNI) dan Bank Nagari belum memiliki skema khusus pembiayaan sanitasi. Namun demikian, bank melayani nasabah dengan usaha konstruksi. Untuk memberikan pinjaman kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pihak bank perlu mengetahui kesehatan dan keberlanjutan usaha. Total biaya proyek juga harus diperhitungkan, dan kemudian pihak bank akan memberikan *sharing* pinjaman sebesar 65% jika ini merupakan pinjaman untuk modal awal usaha. Bank Nagari juga tidak memiliki dukungan khusus terhadap usaha sanitasi. Bank Nagari diatur berdasarkan regulasi pemerintah daerah. Apabila terdapat aturan untuk melayani kredit usaha sanitasi maka Bank Nagari dapat membuka pinjaman untuk bisnis tersebut.

Pemerintah setempat juga melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat membangun jamban dengan memberikan sistem pembiayaan untuk sanitasi. Program tersebut dimulai pada tahun 2015 melalui Lembaga Kredit Koto Baru dengan modal hibah sebesar Rp20.000.000,00. Terdapat dua kelompok kader yang mengajukan kredit dalam bidang sanitasi untuk penyediaan jamban dan tangki septik. KMN Koto Baru memberikan pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 untuk kelompok tersebut. Bunga pinjaman yang diberikan pada masyarakat sebesar 1% yang dikembalikan dalam jangka waktu dua tahun.

Tantangan yang dihadapi program ini adalah adanya kemacetan pengembalian pinjaman yang dimulai setelah bulan ketiga, dengan kendala lainnya yang dialami oleh KMN berupa kurangnya kader dan keterbatasan modal serta belum adanya keinginan masyarakat untuk menjadikan kredit sanitasi sebagai prioritas. Kader yang dimaksud adalah kader yang dapat melakukan sosialisasi mengenai KMN dan informasi kredit yang tersedia di masyarakat dan juga yang dapat menggerakkan masyarakat dalam mengembalikan pinjaman. Namun demikian, lembaga KMN tersebut yakin penambahan modal akan bertambah dengan terbentuknya BUM Nag yang diperkirakan akan dibentuk pada bulan Januari 2018. Menurut narasumber, sistem pemberian kredit sanitasi juga berpotensi menjadi lebih mahal jika dibandingkan sistem arisan. Hal ini disebabkan karena pada arisan jamban, masyarakat tidak menggunakan jasa tukang, melainkan bekerja bersama-sama (gotong royong).

Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung telah melakukan program pelatihan bagi pelaku usaha sanitasi dalam bentuk pelatihan wirausaha. Usaha sanitasi ada dan sudah berjalan, namun terkendala karena minat konsumen masih rendah sehingga usaha menjadi tidak lancar, dan masyarakat yang sudah diberikan pelatihan wirausaha terkendala pada modal dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan hasil diskusi dengan Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung, jika ada kelompok wirausaha sanitasi, maka akses untuk pelatihan dan pendampingan dapat dimiliki. Pelatihan dapat diperoleh jika UMKM mendaftarkan/ menginformasikan kebutuhan pelatihan pada Dinas Koperasi dan Perdagangan. Dinas akan melakukan pendataan kebutuhan dan mengundang UMKM untuk mengikuti pelatihan terkait kewirausahaan. Jenis pelatihan tersebut biasanya berupa manajemen, pembukuan, dan peningkatan ketrampilan.

Saat ini, pihaknya mengaku tidak langsung pada proses teknis sanitasi. Sampai saat ini, Dinas Koperasi dan Perdagangan belum memiliki data keberadaan UMKM untuk sanitasi di Kabupaten Sijunjung.

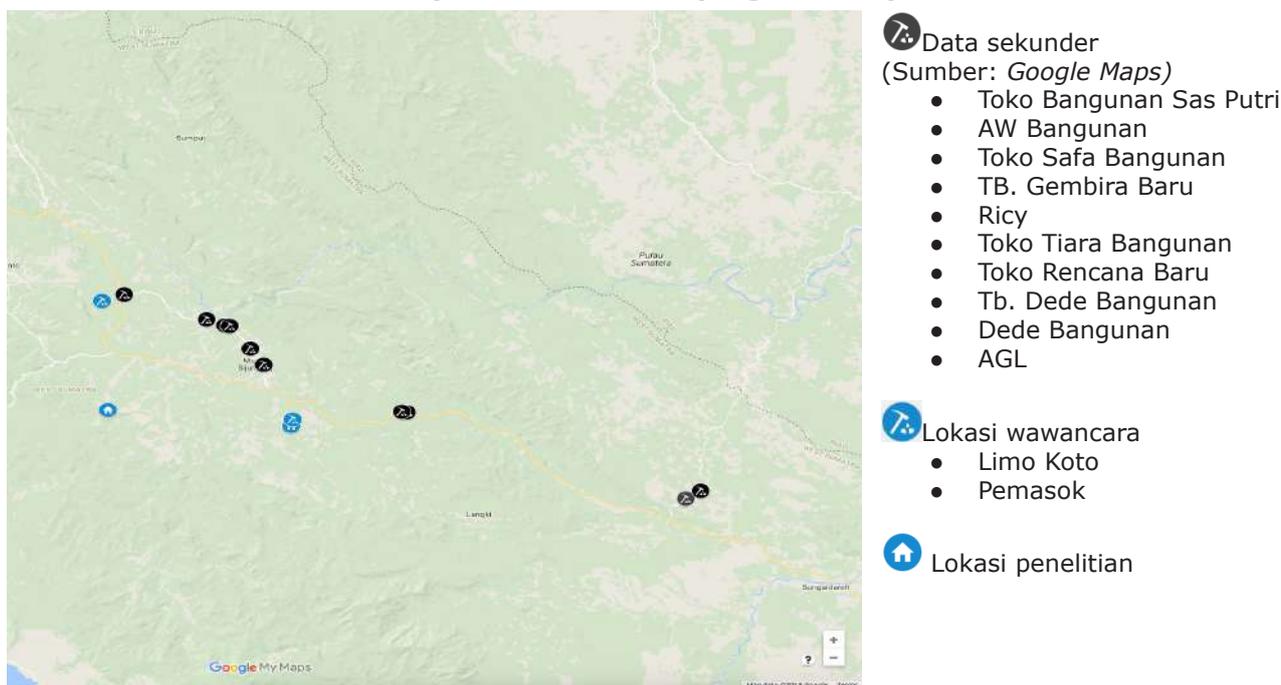
Rantai pasok secara umum: Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa konsumen tidak mengalami kesulitan berarti dalam memenuhi kebutuhan sanitasi. Hal ini mengindikasikan bahwa aktor rantai pasok secara umum mudah ditemui dalam masyarakat terutama di nagari. Pemasok/wusan di nagari memiliki akses yang lancar untuk mendistribusikan material untuk sampai ke tempat calon konsumen.

Berdasarkan Gambar 12, dapat dilihat sebaran aktor rantai sanitasi di Kabupaten Sijunjung yang terdiri dari toko bangunan dan pemasok yang didapatkan dari *google maps* dan data wawancara. Dari data tersebut, dapat diinformasikan bahwa toko bangunan di kabupaten Sijunjung saat ini tersebar di hampir seluruh jalan utama di Sijunjung dan mampu untuk memenuhi kebutuhan persediaan material bangunan. Namun demikian, tidak dapat disimpulkan bahwa persediaan dan jumlah aktor rantai saat ini mampu memenuhi peningkatan kebutuhan drastis di masa mendatang sebagai bentuk usaha peningkatan keinginan memiliki jamban di masyarakat. Hal ini disebabkan peneliti tidak mempunyai cukup data mengenai jumlah wirausaha sanitasi secara keseluruhan dan total kebutuhan jamban.

Dukungan untuk pemasok nagari masih sangat dibutuhkan terutama untuk apresiasi terhadap usaha dan kontribusi yang diberikan pemasok meski pembayaran terlambat. Lembaga Kredit Mikro Nagari dapat mengutamakan pemasok untuk mendapatkan prioritas pelayanan sehingga usaha pemasok pada tingkat nagari menjadi lancar. Dengan demikian, pemasok memiliki modal yang cukup untuk melakukan pemasokan material.

Dalam penelitian ini, wawancara tidak sempat dilakukan dengan wusan karena tidak ada wusan yang sedang aktif dalam menjalankan usaha. Wusan di Kabupaten Sijunjung masih harus terus didampingi dalam pengadaan modal dan pemasaran produk.

Gambar 12 Sebaran Rantai Aktor Sanitasi (Toko Bangunan) di Kabupaten Sijunjung (berdasarkan data yang tersedia)



Dukungan Lingkungan

Institusi keuangan: Saat ini belum ada mekanisme khusus untuk kredit terkait dengan usaha sanitasi untuk aktor rantai sanitasi maupun untuk masyarakat dari institusi keuangan besar seperti bank. Untuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) maupun Bank Nagari tidak melayani secara khusus untuk usaha sanitasi. Namun, bank-bank tersebut juga pernah melayani nasabah dengan usaha konstruksi. Untuk memberikan pinjaman kepada UMKM, pihak bank perlu mengetahui kesehatan dan keberlanjutan usaha serta total biaya produksi, kemudian pihak bank akan memberikan *sharing* pinjaman sebesar 65% sebagai modal awal. Sementara itu, Bank Nagari juga tidak memiliki dukungan khusus terhadap usaha sanitasi. Bank Nagari diatur berdasarkan regulasi pemerintah daerah. Apabila terdapat aturan untuk melayani kredit usaha sanitasi maka Bank Nagari dapat membuka pinjaman untuk bisnis tersebut.

Inisiatif Kredit Mikro Nagari Koto Baru untuk memberikan pinjaman terkait usaha sanitasi patut untuk diapresiasi. Artinya, sudah ada mekanisme yang mau membantu masyarakat untuk pengadaan jamban namun perlu ditingkatkan baik jumlah maupun keterampilan kader dalam pengelolaan dana dan pembukuan. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat juga lebih ditingkatkan untuk berani melakukan pinjaman terkait dengan sanitasi. Masyarakat masih merasa pinjaman untuk kepentingan buka usaha dan pendidikan lebih penting dibandingkan dengan sanitasi.

Lembaga Kredit Mikro Nagari juga berharap petugas nagari (wali nagari dan pengurus) dapat memasukan sanitasi sebagai prioritas dalam penyusunan anggaran dana desa sehingga modal lembaga kredit dapat bertambah.

Pemerintah: Pemicuan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui bidan desa dan sanitarian di desa sudah berjalan cukup efektif di Kabupaten Sijunjung. Kesadaran masyarakat akan pentingnya jamban meningkat dengan adanya pemicuan dari bidan desa dan sanitarian. Perilaku BABS juga sudah berkurang. Menurutnya, warga yang masih buang air besar di sungai sudah menyadari buruknya Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Sosialisasi juga dilakukan kepada Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dengan memberi pengetahuan untuk anak sekolah mengenai adanya jamban di rumah. Dengan demikian, anak dapat memengaruhi orang tua untuk segera mengadakan jamban.

Berkaitan dengan sanitasi dengan pendekatan STBM, pemerintahan terkait yang selama ini berhubungan langsung adalah Dinas Kesehatan. Sedangkan untuk urusan sanitasi tidak saja berkaitan dengan Dinas Kesehatan, namun merupakan bagian dari Badan Perencanaan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Selama ini implementasi kebijakan pendekatan STBM lebih dijalankan oleh Dinas Kesehatan dibandingkan dengan SKPD yang lain. Untuk itu, kerjasama perlu ditingkatkan lagi karena masih banyaknya SKPD lain yang berkaitan dengan sektor sanitasi dan dapat dilibatkan.

Pembinaan wirasusaha sanitasi juga perlu ditingkatkan dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Koperasi dan Perdagangan yang dapat melakukan pembinaan UKM-UKM terkait wirasusaha sanitasi. Selain itu, Dinas Pengembangan Masyarakat Nagari (DPMN) memiliki program PKK Pokja ke-4 terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS).

Sebagai contoh, Pokja ke-1 program PKK (mengenai Pendidikan) diajarkan kepada anak-anak usia dini. Dalam topik pola asuh anak untuk pendidikan kebersihan diri dan lingkungan yang disosialisasikan dengan cara-cara menarik sesuai level usia anak-anak seperti permainan. Hal ini dapat mendorong keluarga melalui anak untuk meningkatkan fasilitas akses terhadap fasilitas sanitasi. Inisiatif dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari terkait sosialisasi PHBS juga patut dilanjutkan sehingga tujuan nasional sanitasi 100 % 2019 dapat tercapai.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah untuk melaksanakan duduk bersama SKPD-SKPD terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat dan jajaran masyarakat desa untuk merumuskan rencana aksi bersama yang turut mendukung tujuan tercapainya sanitasi 100%. Pemerintah juga diharapkan untuk mengajak insitusi keuangan baik makro maupun mikro untuk berdiskusi dan kerja sama mengenai upaya peningkatan akses sanitasi, terutama ketika sosialisasi mengenai wirausaha sanitasi.

Inisiasi masyarakat: Adapun inisiatif yang ada dalam masyarakat dalam menjalankan sanitasi saat ini adalah menjalankan program arisan jamban dan wirausaha sanitasi bersama dengan pendampingan dari pemerintah setempat.

Program arisan jamban

Program ini memungkinkan kerjasama antara kelompok masyarakat dan rantai pasok sanitasi, dalam hal ini pemasok di lingkungan nagari. Kerjasama ini terjalin dengan peran bidan desa yang turut mensosialisasikan program arisan jamban. Ajakan arisan tersebut kemudian diikuti oleh ibu-ibu dan petugas desa yang berhasil mengadakan pembangunan jamban untuk semua anggota arisan berjumlah tujuh belas orang. Saat ini tengah disosialisasikan untuk kegiatan arisan tahap dua. Usaha sosialisasi terus dilakukan untuk mendapat anggota baru melalui sosialisasi ketika ibu-ibu datang ke Posyandu.

Kesuksesan pembangunan jamban tersebut tidak lepas dari bantuan salah satu aktor rantai sanitasi yakni pemasok di nagari. Pemasok membantu menyediakan modal dan material lalu kemudian akan dibayarkan kembali oleh anggota arisan. Setiap bulan ada satu jamban dan satu tangki septik yang dibangun. Hal lain yang turut mendukung keberhasilan tersebut adalah adanya dorongan antara anggota arisan untuk segera membayarkan arisan. Inisiatif tersebut menunjukkan adanya kontrol yang kuat ketika inisiatif pembangunan dilakukan oleh masyarakat.

Program wirausaha sanitasi

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada kelompok wirausaha sanitasi yang telah dibentuk oleh masyarakat dengan dorongan pemerintah melalui sanitarian. Namun usaha tersebut tidak lancar karena kurangnya keinginan masyarakat untuk membangun jamban dan terhambat modal.

Diskusi

Dalam bagian diskusi, akan dianalisis situasi utama, tantangan, dan kesempatan di setiap kabupaten yang berhubungan dengan permintaan konsumen juga rantai pasok dalam kaitan dengan kemampuan, ketersediaan, akses dan layanan purna jual. Pada bagian ini, alur diskusi akan dipresentasikan berdasarkan metodologi 3S-CITE untuk kriteria kesesuaian, keberlanjutan, dan lebih rinci mengenai skalabilitas untuk menganalisis keadaan rantai pasok sanitasi.

Padang Pariaman

Kesesuaian: Pada umumnya, masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman cukup mengerti penggunaan jamban. Jamban yang telah dibangun cukup sesuai dengan kebutuhan pengguna, yang pada umumnya merupakan jamban jongkok. Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman juga tidak merasa ada kesulitan dalam pengadaan bahan-bahan bangunan untuk membangun jamban.

Akan tetapi, untuk tangki septik, kesalahan persepsi masih umum dijumpai di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu pembuangan langsung ke lubang di bagian bawah bangunan jamban masih banyak dilakukan. Masyarakat yang telah memiliki tangki septik yang dindingnya telah disemen pun, tidak merasa ada keperluan untuk melapisi bagian lantai dari tangki septik agar kedap air. Selain itu, sekitar 5 warga yang ditemui pada salah satu FGD di Kabupaten Padang Pariaman tidak memiliki tangki septik di bawah bangunan jamban. Warga masih membuang *blackwater* dari jamban menuju perairan, yaitu pengaliran menggunakan pipa dari jamban menuju kali atau kolam ikan.

Masyarakat juga mengerti bahwa tangki septik lambat laun akan penuh, dan akan muncul kebutuhan untuk menguras tangki septik. Akan tetapi, di desa-desa yang dikunjungi di Kabupaten Padang Pariaman, masih sedikit warga yang memiliki tangki septik yang tepat. Di satu desa yang dikunjungi di Kecamatan Nan Sabaris, pembuangan langsung ke perairan masih banyak dilakukan. Di desa lain di Kecamatan V Koto Kampung Dalam, warga masih enggan membangun tangki septik karena sulitnya menemukan jasa penguras tangki septik yang bersedia melayani desa mereka. Adanya kendala geografis menyebabkan tidak ada jasa penguras yang mau melayani, sehingga warga belum memiliki tangki septik yang sesuai.

Untuk itu, masyarakat masih perlu diberi pengertian akan pembangunan jamban dan tangki septik yang standar. Penyuluhan dan praktek pembangunan jamban pernah dilakukan di Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, tetapi hal ini perlu dilakukan secara berkala. Penyuluhan-penyuluhan rutin terkait sanitasi dan jamban juga dapat diinkorporasikan ke dalam kegiatan masyarakat desa seperti PKK. Terkait kendala geografis di salah satu desa di Kecamatan V Koto Kampung Dalam, hal ini sebenarnya dapat menjadi peluang untuk usaha penguras tangki septik dengan kendaraan kecil sehingga dapat masuk ke desa tersebut.

Keberlanjutan: Pada umumnya, masyarakat yang diwawancarai pada FGD di Kabupaten Padang Pariaman memang lebih ingin memiliki jamban pribadi. Mereka pada umumnya merasa jamban lebih praktis dan aman daripada harus ke sungai untuk buang air, dengan demikian secara perlahan masyarakat bisa meninggalkan kebiasaan buang air di sungai dan menggunakan jamban. Apalagi, warga yang telah memiliki jamban telah mengeluarkan sejumlah uang yang tidak sedikit, sehingga disayangkan apabila jamban tidak digunakan.

Agar dapat dipergunakan dengan sesuai dan konsisten dalam jangka waktu panjang, perawatan dan pembersihan bangunan jamban (termasuk tangki septik) perlu dilakukan. Untuk perawatan dan penjagaan kebersihan, sebaiknya ada masukan dari wusan maupun toko-toko bangunan terkait metode perawatan jamban. Dengan demikian, warga sebagai konsumen dapat melakukan yang tepat. Untuk itu, penyeragaman informasi diperlukan antara wusan, toko bangunan, maupun para tukang dan warga-warga.

Adanya penyuluhan maupun pelatihan secara berkala dirasa perlu, baik untuk para pengusaha sanitasi maupun masyarakat secara umum. Apabila masyarakat telah memiliki jamban pribadi, masyarakat akan cenderung memelihara kebersihan jamban. Jamban yang bersih akan nyaman digunakan, dan akan lebih cenderung digunakan pada jangka waktu panjang.

Permintaan konsumen: Pada dasarnya, warga-warga yang ditemui di Nagari Pauh Kamar dan Nagari Sikucua Barat menginginkan jamban pribadi. Mereka merasa dengan memiliki jamban, ada rasa aman apabila menggunakan jamban tengah malam, dan anak-anak juga tidak perlu ditemani. Dengan adanya jamban pribadi, warga juga merasa lebih praktis, tidak perlu ke sungai, dan tidak perlu membangunkan tetangga apabila harus buang air. Dengan adanya kegiatan pemucuan, warga juga mulai sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dengan buang air pada tempat yang sesuai, sehingga ingin memiliki jamban.

Faktor dominan yang menghambat masyarakat membangun jamban pada umumnya adalah keuangan. Selain itu, di kawasan tertentu di Kabupaten Padang Pariaman, ada hambatan kondisi alam di nagari-nagari tertentu yang menjadi tantangan dalam pembangunan jamban.

Sejauh ini belum ada kegiatan pemucuan yang mengharuskan warga untuk memiliki jamban pribadi. Perlu dimunculkan sedikit keterpaksaan agar warga mau membangun jamban dengan segera. Penerapan keharusan ini tentu harus didukung instansi pemerintah yang bersangkutan, baik di tingkat nagari, kecamatan, hingga kabupaten.

Skalabilitas: Dalam skalabilitas terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan diantaranya: keterjangkauan, ketersediaan, aksesibilitas dan pelayanan purna jual yang dijelaskan berikut ini.

Keterjangkauan: Pada umumnya, warga yang memiliki jamban (atau sudah mulai membangun jamban walaupun belum memiliki tangki septik) sudah mengeluarkan uang Rp1.000.000,00 - Rp2.500.000,00 untuk membangun jamban. Jumlah uang tersebut dirasakan cukup banyak, namun warga yang memiliki jamban pada umumnya merasa harga tersebut cukup pantas. Mereka cukup puas dengan jamban yang dimiliki untuk uang yang telah dikeluarkan.

Warga yang belum memiliki jamban cenderung merasa uang yang diperlukan sangat banyak (Rp1.000.000,00 - Rp5.000.000,00) dan merasa ada prioritas lain sehingga belum memiliki jamban. Warga merasa jamban akan mahal untuk pembayaran tukang yang dikhawatirkan akan memperlama pengerjaan pembangunan dan tidak efisien. Dapat terlihat dari persepsi tentang harga disini bahwa terdapat kecenderungan dari masyarakat yang belum memiliki jamban berfikir bahwa diperlukan uang yang tinggi (sampai dengan Rp5.000.000,00) untuk membangun jamban. Hal ini menunjukkan, bahwa jika ada produk sanitasi yang lebih terjangkau, hal ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat.

Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman pada umumnya bekerja di bidang pertanian/ perkebunan dimana pendapatan bulanan kurang stabil, mereka cenderung mendapat uang di saat-saat tertentu dalam 1 tahun, terutama saat panen. Kurang stabilnya harga hasil panen juga memengaruhi warga untuk menyisihkan uang secara teratur untuk membangun jamban. Karena pendapatan bulanan yang tidak stabil, warga juga cenderung enggan meminjam dari institusi keuangan seperti Koperasi karena tidak ingin membayar bunga. Mereka ragu bisa selalu membayar pinjaman pada tanggal jatuh tempo, dan berujung pada membengkaknya jumlah yang harus dibayarkan.

Di Kabupaten Padang Pariaman, di Nagari Pauh Kamar maupun Nagari Sikucua Barat belum ada pinjaman dari institusi keuangan yang khusus untuk produk sanitasi. Masih sedikitnya produk pinjaman sanitasi ini disebabkan oleh sedikitnya permintaan pembangunan jamban dari konsumen. Untuk itu perlu dimunculkan urgensi masyarakat untuk mempunyai jamban pribadi, yang perlu dipicu oleh instansi pemerintah bersangkutan. Apabila telah terlihat ada kenaikan permintaan, barulah produk-produk pinjaman dan juga usaha sanitasi dapat berkembang dengan lebih baik.

Ketersediaan: Menyangkut ketersediaan barang, toko-toko bangunan yang diwawancarai menyatakan kadang mereka mengalami kekurangan bahan. Toko-toko tersebut bergantung pada *supplier* besar dari luar kota, yang pada umumnya berada di Pulau Jawa. Kekurangan ini diantisipasi dengan saling melengkapi barang dagangan dari toko-toko bangunan lainnya. Distributor yang berada di Kota Padang cenderung jarang mengalami kekurangan stok bahan bangunan. Mereka menyatakan kekurangan hanya terjadi sekitar satu kali dalam setahun.

Untuk persediaan bahan wirausaha sanitasi produksi dudukan jamban, umumnya bahan baku dan komponen bisa didapatkan sepanjang tahun, dan produksi lancar selama cuaca mendukung. Akan tetapi, jumlah cetakan dirasakan masih kurang, dan masih harus membeli dari Pulau Jawa. Wirausahawan dudukan jamban menyatakan mereka pernah mencoba membuat cetakan sendiri, tetapi gagal. Selain itu, tenaga kerja dan tempat produksi usaha produksi dudukan jamban ini masih terbatas hingga jumlah produksi masih rendah dan belum optimal.

Aksesibilitas: Dalam menjangkau konsumen-konsumen baru, biasanya toko-toko bangunan (terutama di wilayah kampung/nagari) mengandalkan rekomendasi dari mulut ke mulut. Beberapa toko bangunan yang besar, terutama di sekitar Kota Padang, sudah cukup terkenal dan tidak lagi melakukan pemasaran lagi secara personal.

Produksi dudukan jamban cenderung masih belum berkembang pesat, dengan konsumen datang langsung ke toko. Sejauh ini bisnis produksi dudukan jamban ini belum giat melakukan pemasaran. Mereka menyatakan bahwa belum ada usaha khusus dari mereka untuk menjangkau konsumen baru. Jumlah produksi terbatas dan sumber daya manusia yang belum optimal menjadi tantangan-tantangan utama dalam melakukan pemasaran produk mereka. Masih kecilnya skala produksi usaha produksi jamban ini menjadi tantangan tersendiri dalam keberlanjutannya. Perlu ada pendampingan lanjutan untuk mengembangkan dan memastikan keberlanjutan usaha produksi dudukan jamban ini.

Pelayanan purna-jual/After-sales service: Pada umumnya, usaha-usaha di Padang Pariaman tidak menawarkan layanan purna-jual/*after-sales service*. Toko bangunan di Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung mengatakan mereka hanya sebatas memberi rekomendasi untuk bahan maupun barang yang diperlukan untuk perbaikan/maintenance.

Di Nagari Pauh Kamar dan Nagari Sikucua Barat yang dikunjungi, jamban yang dimiliki warga masih cenderung baru, sehingga sejauh ini warga belum ada yang merasa memerlukan layanan perbaikan/perawatan.

Tantangan utama dalam meningkatkan akses sanitasi dalam rantai pasok adalah dengan meningkatkan permintaan dari masyarakat. Usaha sanitasi akan sulit bergerak dan berkembang apabila mereka tidak melihat ada permintaan akan kebutuhan produk-produk sanitasi.

Sijunjung

Kesesuaian: Pada kriteria *suitability* atau kesesuaian produk khususnya jamban dan kelengkapannya dalam penggunaannya, masyarakat sudah mengetahui standar jamban yang dibutuhkan serta fasilitasnya termasuk fasilitas cuci tangan dan kebersihan jamban. Dalam penggunaannya juga, diketahui bahwa produk jamban yang selama ini diproduksi sesuai dengan kenyamanan pengguna.

Kebanyakan warga di nagari menggunakan wc jongkok karena lebih nyaman dibandingkan dengan wc duduk. Masyarakat juga mengetahui bahwa tangki septik perlu disedot ketika sudah penuh. Selama ini masyarakat tidak kesulitan dalam mendapatkan model jamban yang diinginkan karena disediakan ketika dipesan pada tukang dan tersedia di wusan atau toko.

Dalam data penelitian *sanifoam* SNV juga disebutkan bahwa sebagian masyarakat mampu menyebutkan atribut atau perlengkapan jamban yang diinginkan yaitu, WC jongkok, WC duduk (untuk orang yang sudah tua), ada tangki septik di tanah dan ada bak air (Studi Formatif SNV, 2017). Namun masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa tangki septik yang meresap adalah tangki septik yang baik dimana seharusnya tangki septik adalah kedap. Berdasarkan fakta tersebut, perlu dilakukan penyuluhan terkait dengan pengetahuan tentang pembangunan jamban dan tangki septik standar. Penyuluhan dilakukan baik pada masyarakat dan wirausaha sanitasi.

Keberlangsungan: Untuk kriteria *sustainability*/keberlangsungan penggunaan produk, masyarakat yang sudah memiliki jamban menyebutkan kebiasaan untuk BAB di sembarang tempat menjadi jarang dilakukan. Penggunaan jamban di rumah menjadi sebuah kebiasaan seluruh anggota keluarga. Masyarakat juga sudah memiliki perlengkapan kebersihan jamban dan kamar mandi. Mereka merasa lebih nyaman menggunakan jamban yang telah dibersihkan. Secara ekonomi masyarakat tidak kesulitan dalam melakukan perawatan dan menjaga kebersihan jamban yang dibangun.

Berkaitan dengan pemeliharaan, ada masyarakat yang melakukan penyedotan jamban sendiri atau membangun kembali tangki septik yang baru baik oleh tukang maupun sendiri. Mengenai perawatan dan pembersihan tangki septik sebaiknya wusan dan tukang dapat memberikan informasi terkait pada konsumen sehingga ketika dibutuhkan, konsumen dapat mengambil tindakan yang sesuai. Maka hal ini menjadi perhatian bagi penyuluh sanitasi untuk memastikan pengetahuan pemeliharaan jamban pada wusan, tukang maupun warga masyarakat.

Sebagian masyarakat tetap rutin menggunakan jamban meskipun jamban tersebut digunakan bersama (2 keluarga). Namun beberapa warga menyebutkan bahwa mereka tidak menggunakan jamban lagi jika air tidak lancar yang disebabkan pipa air belum mencapai rumahnya.

Berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang sudah memiliki jamban, maka dapat dipastikan bahwa jika sudah memiliki jamban, masyarakat akan terus menggunakan jamban tersebut dengan melakukan perawatan dan menjaga kebersihan sehingga jamban nyaman digunakan. Namun yang perlu diperhatikan adalah keberlanjutan dari sumber air dan kemauan

masyarakat untuk melakukan penyedotan tangki septik. Karena jika tangki septik tidak disedot dapat menimbulkan kebocoran dan kerusakan pada sarana.

Permintaan konsumen: Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa masyarakat memiliki keinginan untuk membangun jamban sendiri. Hal ini disebabkan oleh kesadaran bahwa perilaku buang air besar di sungai buruk dan juga terkait privasi, keamanan dan kenyamanan dalam BAB. Rasa malu dengan tamu karena tidak memiliki jamban juga menjadi salah satu pendorong masyarakat untuk memiliki jamban. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu: keinginan untuk memiliki jamban tidak dibarengi dengan kesadaran untuk segera melakukan pengadaan jamban. Masyarakat memprioritaskan urusan pokok lainnya yakni memenuhi kebutuhan anak dan membiayai anak sekolah. Selain itu terdapat kebiasaan untuk menunggu sampai pembangunan rumah bagus. Rumah bagus tidak dibangun dalam jangka waktu yang cepat karena membutuhkan waktu untuk mengumpulkan uang sehingga pembangunan jamban pun tidak menjadi prioritas saat membangun rumah sederhana.

Sementara itu, peningkatan kesadaran terus dilakukan, namun sanitarian masih kewalahan untuk menjangkau semua area untuk melakukan pemucuan karena keterbatasan waktu dan tenaga. Untuk itu, peningkatan jumlah sanitarian atau kader sanitarian desa perlu dimaksimalkan sehingga pemucuan berlangsung efektif. Pelatihan dan pengembangan ketrampilan sanitarian juga masih dirasa perlu oleh sanitarian. Salah satu bidan desa mengaku bahwa mengikuti pelatihan di kabupaten tentang pemucuan sangat membantu dalam pelaksanaan tugas hariannya di desa.

Sanitarian juga diharapkan mengetahui kondisi lingkungan atau area warga masyarakat untuk mengetahui cara dan metode yang tepat dalam menyampaikan informasi teknis sanitasi kepada masyarakat. Di Nagari Batu Manjukur misalnya, beberapa rumah tinggal berada di ketinggian, untuk itu perlu dilakukan persiapan area terlebih dahulu. Hal ini dapat mempermudah baik sanitarian dan masyarakat untuk menemukan cara dan teknis yang paling efektif dalam mengadakan jamban yang sesuai.

Dorongan dari perangkat desa dalam mendukung 5 pilar STBM juga dibutuhkan. Aturan untuk berhenti BABS dapat menjadi kesepakatan bersama dalam rapat desa sehingga bagi yang melanggar dapat dikenai sanksi yang tegas. Selain itu, penilaian dan apresiasi terhadap desa terus diadakan dengan indikator penilaian desa yang menjalankan *good governance* yang dinilai dari sanitasi. Hal ini akan terus memacu desa dan kader-kadernya dalam mendorong warga masyarakat untuk pengadaan jamban.

Keterjangkauan: Salah satu tantangan dalam aspek keterjangkauan kepada masyarakat adalah: sebagian warga menganggap bahwa biaya pengadaan jamban mahal. Biaya pembangunan jamban tersebut mahal, karena penghasilan yang tidak menentu. Harga cenderung mahal (tidak terjangkau) karena penghasilan yang kurang. Penghasilan bervariasi dari Rp1.000.000,00 – Rp2.000.000,00 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan anak sekolah. Masih sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari juga merupakan salah satu penghambat pengadaan produk sanitasi.

Namun ada indikasi bahwa masyarakat seakan menunggu pengadaan jamban dari pemerintah atau hibah dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Fakta bahwa masyarakat dapat membeli/ kredit kendaraan bermotor dapat menjadi salah satu pertimbangan bahwa sebenarnya masyarakat mampu namun karena pengadaan jamban bukan prioritas, maka belum dilakukan. Namun, perihal tersebut masih harus digali lebih dalam. Salah satu tantangan besar pemerintah dan LSM adalah mengubah pola pikir masyarakat. Artinya bahwa sosialisasi STBM masih perlu ditingkatkan. Keterlibatan masyarakat dalam STBM masih perlu digalakkan.

Warga masyarakat juga mengaku tidak memiliki akses pinjaman ke Lembaga Kredit Mikro atau Koperasi. Hal ini disebabkan karena mereka tidak menabung atau memiliki persyaratan yang menjadi ketentuan koperasi.

|| Peraturannya di sini, kalo nabung bisa kita minjam, kalo ga nabung ga bisa kita minjam, gimana kita mau nabung bu, anu, harian aja ga cukup, kan?

(Warga FGD)

Namun pinjaman terkait sanitasi dari Lembaga Kredit Mikro juga belum menjadi hal biasa bagi masyarakat. Warga masyarakat melakukan pinjaman dengan prioritas untuk biaya pendidikan, buka usaha dan pengadaan kendaraan bermotor.

Salah satu lembaga kredit mikro yang ditemui mengakui bahwa pinjaman untuk kredit terkait pembangunan jamban belum ada. Namun, pihaknya terbuka jika ada pinjaman terkait. Tentu saja dengan dukungan dari masyarakat terutama desa sehingga modal dan kontrol terhadap peminjam dapat dilakukan demi kelancaran Lembaga Kredit Mikro Nagari.

Inisiatif arisan jamban juga perlu digalakkan. Optimisme dan semangat masyarakat perlu dibangun kembali sehingga arisan dapat berjalan dengan lancar. Fungsi kontrol sesama warga, bidan desa dan kader selalu terus digalakkan sehingga tidak ada kemacetan. Tidak dipungkiri bahwa masyarakat membutuhkan pendampingan dan kontrol yang terus menerus. Untuk itu, pendampingan terhadap kader desa, bidan, sanitarian dalam bentuk pelatihan dan pengembangan kapasitas perlu terus dilakukan selain peningkatan insentif.

Ketersediaan: Secara umum diketahui bahwa masyarakat tidak mengalami kesulitan berarti dalam mendapatkan akses terhadap produk sanitasi. Pemasok desa selalu siap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu tantangan yang harus dipertimbangkan adalah produksi cetakan jamban. Jika target pencapaian sanitasi 100% serentak di seluruh kabupaten maka diperlukan dudukan jamban dengan jumlah yang cukup banyak. Keberadaan wusan akan menjadi penting, namun wusan memiliki keterbatasan untuk produksi karena keterbatasan cetakan. Jika wirausaha sanitasi tidak siap dengan produksi, maka akan kesulitan untuk mendapatkan dudukan jamban. Untuk itu, perlu didata dan diperhitungkan keberadaan wirausaha sanitasi dan jumlah produksi dudukan jamban dan cetakan tangki septik dan mendorong penambahan wusan.

Akses distribusi sanitasi dari kota ke desa tidak menjadi kendala, lebih lagi ada warga masyarakat yang telah dilatih untuk memproduksi sanitasi. Terkait kendala yang dihadapi oleh pemasok maka disarankan bahwa Lembaga Kredit Mikro dapat memberikan pinjaman dengan mudah kepada pemasok dengan mempertimbangkan kontribusi nyata yang telah diberikan.

Bantuan modal usaha terhadap aktor rantai sanitasi seperti toko bangunan kecil dan pemasok di desa, dapat lebih ditingkatkan. Kekhawatiran masyarakat untuk melakukan pinjaman di bank menjadi salah satu tantangan dalam pengadaan modal, kemungkinan dipicu oleh minimnya informasi. Untuk itu pemerintah dapat menggandeng institusi keuangan dan paguyuban usaha sanitasi dalam diskusi dan sosialisasi atau pembinaan wirausaha sanitasi, sehingga informasi menjadi jelas. Perlu ditekankan bahwa bank/institusi keuangan membutuhkan usaha yang berkelanjutan dan sehat. Untuk itu, perlu dilakukan peninjauan ulang dan evaluasi mengenai keberlanjutan wirausaha sanitasi.

Aksesibilitas: Masyarakat dapat dengan mudah menemui aktor rantai pasok sanitasi. Kehadiran alat telekomunikasi di desa membuat masyarakat tidak perlu pergi ke toko, melainkan dapat memesan langsung melalui pesan singkat atau panggilan. Pemasok juga mengaku tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam waktu tiga hari, penyedia dapat menyediakan pesanan/ permintaan dari masyarakat nagari untuk pemesanan material yang biasanya sudah tersedia di pasaran seperti pipa, semen, dan besi.

Layanan purna-jual/After-sales service: Layanan purna jual untuk usaha sanitasi tidak menjadi salah satu hal yang ditekankan atau diwajibkan oleh konsumen. Hal ini disebabkan hubungan konsumen dan masyarakat selesai pada saat pembelian karena selanjutnya penggunaan produk tergantung pada konsumen. Namun konsumen dapat berkonsultasi ke toko dan tukang jika ada permasalahan, misalnya terkait pemindahan tangki septik jika penuh. Biasanya, jika ada permasalahan masyarakat dapat memperbaiki sendiri atau kembali berhubungan dengan tukang dengan kembali melakukan pembayaran.

Berdasarkan analisis masing-masing aspek tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat dapat dengan mudah untuk menemukan rantai pasok sanitasi. Namun demikian kendala utama dalam rantai pasok sanitasi adalah permintaan konsumen yang masih kurang.

Kelebihan dan Kekurangan Metode 3-S dalam Penelitian

Bagian ini akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan metode 3-S dalam penelitian tentang rantai sanitasi. Metode ini tidak menjelaskan mengenai permintaan konsumen terkait sanitasi.

Metode skalabilitas 3S ini memberikan penjelasan yang memadai mengenai aspek penting dalam rantai pasok, khususnya mengenai keterjangkauan, aksesibilitas dan ketersediaan. Hal ini termasuk keuangan yang merupakan fokus dalam penelitian ini dalam bagian keterjangkauan. Kriteria terakhir dalam skala yaitu layanan purna jual kurang digunakan karena bukan merupakan pertanyaan kunci dalam rantai pasok saat ini.

Sangat penting untuk diketahui bahwa metode 3-S biasanya digunakan untuk produk yang spesifik dan terdefiniskan dengan jelas (seperti, dudukan jamban), di mana rantai pasok sudah diketahui. Dengan demikian, dalam laporan ini tidak disediakan penjelasan mengenai *mapping* rantai pasok dalam level makro. Pemetaan dilakukan terpisah. Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini berfokus pada analisis secara umum dari rantai pasok sanitasi, untuk memberikan rekomendasi pada pemerintah daerah. Untuk itu, dalam penelitian ini menggunakan metode 3S sebagai pedoman dengan pertanyaan khusus penelitian dikembangkan oleh tim peneliti, dibandingkan mengaplikasikan metode secara langsung.

Sebagai kesimpulan, metodologi 3-S dalam penelitian ini mempertimbangkan persediaan dan permintaan pada kondisi eksisting dan tidak memberikan informasi mengenai *trend* dan kecenderungan proyeksi persediaan dan permintaan di masa mendatang.





Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Masyarakat konsumen di Kabupaten Sijunjung dan Padang Pariaman memiliki pemahaman tentang BABS dan mau memiliki jamban pribadi namun prioritas pembangunan jamban masih tergolong rendah.
- Berdasarkan hasil diskusi dengan warga secara umum, pengetahuan warga akan tangki septik masih cenderung kurang. Warga menganggap tangki septik yang baik ber dinding bata, memiliki tutup dan ventilasi cukup, tetapi dasarnya tanah.
- Adapun kendala dalam pembangunan jamban di rumah tangga, diantaranya: biaya pembangunan dan tukang yang cukup mahal, pembangunan jamban bukan menjadi prioritas, menunggu sampai pembangunan rumah selesai, sulit akses air, lokasi atau area rumah tinggal yang tidak rata (berada di tebing atau wilayah pegunungan terjal), dan kekhawatiran tidaknya ada sistem pengurusan tinja ketika tangki septik penuh.
- Inisiatif pemerintah Kabupaten Sijunjung dan warga dalam pengadaan jamban dengan menggunakan skema arisan jamban sudah ada, dan saat ini terus digalakkan. Untuk Kabupaten Padang Pariaman, masih harus terus disosialisasikan karena belum ada di kedua nagari tersebut.
- Warga pernah mendengar atau tahu tentang lembaga keuangan yang dapat memberikan kredit sanitasi. Namun, ada kecenderungan warga enggan meminjam ke lembaga keuangan, karena harus membayar bunga sedangkan pemasukan per bulan mereka tidak stabil. Akibatnya warga juga cenderung enggan meminjam dari institusi keuangan seperti koperasi karena ragu dapat membayar pinjaman pada waktu yang ditentukan. Perlu ada solusi untuk opsi produk pinjaman dalam jangka panjang yang lebih memudahkan warga untuk membayar dalam periode yang lebih lama.
- Masih sedikitnya produk pinjaman sanitasi ini dapat disebabkan oleh sedikitnya permintaan pembangunan jamban dari konsumen. Untuk itu perlu dimunculkan urgensi masyarakat untuk mempunyai jamban pribadi. Jika ada kenaikan permintaan, produk-produk pinjaman dan juga usaha sanitasi dapat berkembang dengan lebih baik.

Aktor Rantai Sanitasi

- Aktor rantai sanitasi yaitu toko-toko bangunan tidak mengalami kesulitan berarti dalam penyediaan produk sanitasi. Namun demikian dukungan untuk pemasok material dalam nagari perlu diberikan. Aktor rantai sanitasi seperti tukang dan pengusaha sanitasi skala nagari atau kecamatan tidak memiliki akses leluasa terhadap lembaga keuangan besar seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau Bank Nagari.
- Aktor rantai sanitasi seperti wusan tidak secara teknis terlihat sebagai UMKM mandiri. Usaha sanitasi biasanya termasuk dalam UMKM jenis usaha konstruksi. Hal ini menyebabkan UMKM tersebut tidak menjadi prioritas dalam binaan dinas terkait.
- Aktor rantai sanitasi saat ini, tidak melayani pelayanan purna-jual, seperti perbaikan jika jamban rusak, dan pelayanan penyedotan jamban
- Aktor rantai sanitasi belum mendapatkan pendampingan berkelanjutan dari pihak terkait baik mengenai akses terhadap modal dan pelatihan wirausaha (pemasaran dan manajemen keuangan).

Lembaga Keuangan

- Institusi keuangan tidak menyediakan skema pinjaman untuk sanitasi.
- Institusi keuangan skala mikro atau KMN dan bank, baik bank BRI dan bank Nagari, belum memiliki prioritas untuk memberikan pinjaman terkait sanitasi. BUM Nag serta BPR juga tidak memprioritaskan wirausaha sanitasi karena belum melihat permintaan masyarakat yang tinggi akan sarana sanitasi sehingga khawatir pengembalian pinjaman macet. Prioritas diberikan untuk bidang pertanian, peternakan dan perdagangan (usaha mikro kecil menengah)
- Belum ada kerjasama antara pemerintah dan lembaga keuangan dalam skema pinjaman sanitasi.
- Institusi keuangan skala nagari membutuhkan pelatihan dan pendampingan pemerintah terkait mengenai manajemen keuangan dan kredit lembaga mikro kredit.

Lembaga Pemerintah

- Tenaga sanitarian kurang karena jangkauan wilayah pelayanan yang luas.
- Pemerintah melalui Dinas Kesehatan telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan sanitasi yang menyeluruh diantaranya: pelatihan wirausaha sanitasi. Pemerintah merasa perlu untuk terus melakukan pemicians dan melakukan sosialisasi sesuai budaya setempat.
- Beberapa SKPD dapat menjalin diskusi terkait pencapaian program sanitasi nasional pada tahun 2019. Diketahui bahwa kerjasama sinergis pernah terjalin. Namun belum terjalin secara berkelanjutan. Dinas yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Kesehatan adalah seperti Dinas Koperasi dan Perdagangan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
- Belum ada kerjasama pemerintah dan institusi keuangan dalam skema pinjaman sanitasi.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi terkait rantai pasok sanitasi di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Sijunjung, maka berikut beberapa rekomendasi tentang aksi yang dapat dilakukan guna mengoptimalkan kegiatan rantai pasok sanitasi:

Mendorong pemahaman pentingnya pembangunan jamban dengan mendiskusikan bersama cara yang paling efektif.

Salah satu cara yaitu menerapkan mekanisme penalti berupa denda jika tidak membangun jamban pribadi. Penetapan sanksi disepakati bersama oleh seluruh perangkat desa. Beberapa alternatif pendekatan yang dapat dilakukan adalah:

Pengadaan penyuluhan dan pemicuan kepada warga untuk bersama-sama melakukan identifikasi permasalahan yang dapat timbul jika tidak memiliki jamban. Kegiatan tersebut dilakukan dalam beberapa pertemuan dengan beberapa kegiatan bersama yaitu: identifikasi permasalahan, penyuluhan sanitasi yang baik sesuai standar nasional, diskusi penyelesaian masalah dan rencana aksi bersama. Kegiatan melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemerintah (Dinas Kesehatan melalui bidan dan sanitarian) dan tokoh agama.

Informasi yang diberikan harus lengkap mengenai jamban dan tangki septiknya. Warga di Padang Pariaman, kebanyakan hanya membangun jamban tanpa tangki septiknya. Untuk itu, perlu ada diskusi dan kesepakatan mengenai insentif atau penalti dalam korong atau per RT apabila warga tidak memiliki jamban sehat. Perlu dimunculkan sedikit keterpaksaan agar warga mau membangun jamban dan tangki septik dengan segera. Fasilitas juga perlu diadakan seperti layanan perbaikan dan pengurusan tangki septik yang menjangkau daerah-daerah dengan kesulitan akses. Penerapan keharusan ini tentu harus berdasarkan keputusan bersama sehingga inisiatif tetap berasal dari seluruh masyarakat.

Pendekatan yang dapat dilakukan yakni melalui wali nagari bersama pemimpin adat setempat yaitu Ninik Mamak dan pemimpin agama, dengan terlebih dahulu menggali ajaran atau paham dan sikap adat dan agama terhadap lingkungan hidup. Sosialisasi dapat dilakukan melalui ceramah agama dan sikap adat. Wali nagari, pemimpin adat dan pemimpin agama juga turut melakukan penyuluhan dan pemicuan dalam poin 1.

Menerapkan aturan bersama seluruh warga nagari untuk menjaga warisan alam dengan tidak mengotori sungai.

Untuk menghilangkan kebiasaan BABS, salah satu usaha yang dilakukan adalah penentuan denda secara adat nagari kepada masyarakat yang kedapatan BABS. Selain itu, dapat digali kembali *local wisdom* mengenai kelestarian dan kebersihan nagari untuk dapat disosialisasikan kepada masyarakat baik dalam bentuk slogan nagari, nasihat, dan ceramah tokoh masyarakat dan ulama.

Berdasarkan studi formatif V4C, keagamaan dan budaya masyarakat masih sangat kental. Untuk itu pendekatan kepada pemimpin adat (Ninik Mamak) perlu dilakukan dengan menggali kembali ajaran atau sikap leluhur terhadap lingkungan hidup. Pendekatan dapat dilakukan oleh staf desa dan pendamping desa. Selanjutnya hasil kesepakatan dalam pendekatan tersebut dapat disosialisasikan pada saat pertemuan dengan warga.

Melakukan advokasi pada saat penyusunan BUM Nag dengan mengusulkan kredit sanitasi yang dapat dilakukan oleh bidan, kader, sanitarian, dan pendamping desa.

Adanya advokasi dinas terkait dalam perumusan jenis usaha BUM Nag sehingga usaha sanitasi dapat diprioritaskan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dapat mengeluarkan regulasi mengenai jenis usaha kredit BUM Nag yang fokus pada sanitasi selain ekonomi dan pendidikan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan BUM Nag yakni melalui lembaga kredit mikro. Lembaga kredit mikro dapat memberikan kredit baik pada pelaku usaha sanitasi maupun pada warga masyarakat yang ingin membangun jamban.

Namun demikian, menyadari ketidaklancaran/terhambatnya perputaran uang dalam pengembalian kredit sanitasi, maka perlu dilakukan evaluasi mendalam mengenai kredit sanitasi yang telah dilakukan. Diketahui bahwa pernah ada kredit terkait sanitasi namun mengalami kemacetan dalam pengembalian. Untuk itu perlu dilakukan penelusuran kembali mengenai sebab-sebab dan pemecahan terhadap program kredit tersebut. Tim evaluasi dapat dibentuk bersama baik oleh pengurus lembaga kredit mikro dan staff desa termasuk tenaga pendamping desa.

Pendampingan yang berkelanjutan dari usaha yang berjalan juga perlu dilakukan demi memastikan keberlanjutan usaha-usaha yang bergerak di bidang sanitasi. Upaya yang dilakukan adalah rutin dalam melakukan pertemuan bulanan sehingga aktivitas wirausaha sanitasi maupun usaha lainnya dapat terkontrol.

Dalam melakukan advokasi dibutuhkan sumber daya manusia yang mengerti mengenai program pemerintah terkait sanitasi dan permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu dibutuhkan adanya pembinaan terhadap pendamping desa dan kader-kader nagari oleh Dinas terkait, mengenai identifikasi dan prioritas kebutuhan dalam nagari. Juga mensosialisasikan program nasional pemerintah dalam STBM

Menawarkan produk pinjaman dengan pembayaran jangka panjang terhadap warga.

Masyarakat pada umumnya bekerja di bidang pertanian dengan pendapatan bulanan yang kurang stabil tergantung pada keadaan panen sehingga warga juga cenderung enggan meminjam dari institusi keuangan karena ragu untuk selalu dapat membayar pinjaman pada setiap tanggal jatuh tempo. Untuk itu, perlu diterapkan skema yang tidak memberatkan masyarakat agar mereka mau mengajukan pinjaman.

Dewasa ini, ada beberapa skema pinjaman mikro kredit yang ditargetkan untuk keluarga dengan kemampuan ekonomi rendah maupun sedang. Salah satu skema pinjaman yang dapat diajukan untuk masyarakat dengan penghasilan yang rendah adalah dengan menerapkan prinsip lembaga keuangan mikro *Grameen Bank*¹. Dengan skema ini, pihak pemberi memberikan pinjaman kepada kaum perempuan tanpa jaminan. Pinjaman diberikan pada grup yang berisi lima perempuan yang saling mengenal dekat, dan mereka diberikan pelatihan finansial sebelum diberi pinjaman serta pertemuan mingguan/secara berkala. Namun, perlu dipastikan bahwa kontrol dari sesama anggota cukup kuat sehingga pinjaman dapat dikembalikan tepat waktu.

¹ Grameen Bank group lending model: <http://grameenresearch.org/grameen-group-lending-model/>

Untuk lebih jelasnya mengenai *Grameen Model*, dapat dijelaskan melalui skema berikut:

- Beberapa individu yang tidak mampu membangun jamban terutama perempuan dapat membentuk kelompok berjumlah 4-5 orang.
- Kelompok-kelompok tersebut kemudian mendapatkan pelatihan keuangan selama lima hari (waktu dapat disesuaikan) dan mendapatkan rekening bersama untuk menabung.
- Kelompok-kelompok kemudian mendapatkan pinjaman terutama untuk pembangunan jamban.
- Manager /pegawai lembaga keuangan mikro mulai melakukan *monitoring*, terhadap kelompok dan kelompok mulai melakukan pengembalian pinjaman.
- Jika pengembalian pinjaman sudah lunas, maka kelompok dapat mengajukan pinjaman baru. Lama waktu pinjaman disesuaikan dengan kesepakatan bersama dalam kelompok. Untuk itu jumlah yang diharuskan dibayarkan dalam kurun waktu tertentu disesuaikan dengan kesepakatan. Dalam mengantisipasi kemungkinan kredit yang macet maka tim dapat melakukan penelitian awal terdahulu mengenai kesanggupan masyarakat dalam mengembalikan pinjaman dengan mempertimbangkan apakah kredit dapat dibayarkan per bulan atau pada saat musim panen yang harus diteliti lebih lanjut oleh tim pemberi kredit.

Penerapan model tersebut dapat dilakukan dengan mendorong kegiatan arisan jamban. Lembaga Kredit Mikro dengan memberikan bantuan pinjaman kepada kelompok arisan jamban. Selama ini kelompok membangun satu toilet dalam kurun waktu satu bulan. Dengan bantuan dari KMN, maka pembangunan toilet dapat dilakukan lebih cepat. Untuk pengembalian pinjaman, kontrol sesama ibu-ibu arisan dan pemasok dapat lebih menjamin pengembalian pinjaman. Untuk berjalannya program ini maka dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk pembinaan tim fasilitator mengenai *grameen model* dan aplikasinya dalam masyarakat. Studi lanjut mengenai program ini sangat disarankan sehingga pemerintah terkait dan tim dapat melakukan penyesuaian model *grameen* sesuai dengan keadaan masyarakat setempat.

Gambar 14 Skema Grameen Bank yang dapat diterapkan (Sumber::<http://ecomeye.com/wp-content/uploads/2014/08/grameen-model.png>)



Beberapa lembaga kredit seperti Komida (Koperasi Mitra Dhuafa) dan Bina Artha sudah melakukan kredit sanitasi yang dapat diikuti dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Berikut contoh skema simulasi kredit sanitasi.

Tabel 12 menunjukkan salah satu skema pinjaman kredit sanitasi yang ditawarkan oleh Komida bagi masyarakat miskin. Jumlah pinjaman yang ditawarkan sebesar Rp1.000.000,00-Rp5.000.000. Masyarakat dapat memilih besar pinjaman dan jangka waktu pengembalian pinjaman sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan membayar dalam jangka waktu 25 sampai 100 minggu. Pada minggu ke-2 hingga ke-26, masyarakat mengembalikan pinjaman dan margin (sebesar 4%). Pada minggu ke-26, jumlah yang dibayarkan adalah jumlah sisa pinjaman sehingga jumlah yang dibayarkan akan berbeda. Dalam skema kredit ini, beberapa syarat dan ketentuan berlaku terkait keanggotaan, kelancaran keanggotaan dan persetujuan branch manager.

Menjadikan syarat kepemilikan jamban sebagai syarat utama dalam kredit lainnya yang diminati masyarakat.

Pinjaman untuk sanitasi baiknya dianggarkan secara bersama-sama demi mencapai desa STBM. KMN dapat menawarkan pinjaman untuk wirausaha sanitasi. Apabila jenis kredit ini tidak diminati, maka kredit yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sekunder seperti kendaraan bermotor, maka KMN dapat menjadikan kriteria masyarakat yang sudah punya jamban yang boleh mendapatkan akses pinjaman.

Dinas Kesehatan Kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dapat melakukan penjemabatan antar aktor rantai pasok sanitasi, terutama untuk wusan yang masih belum optimal melakukan kegiatan pemasaran.

Wirausaha sanitasi yang telah ada di Kabupaten Padang Pariaman dan Sijunjung berpotensi untuk menjadi pemasok tambahan ke toko-toko bangunan, selain mereka memasarkan langsung kepada konsumen. Namun, pendampingan perlu dilakukan demi mengembangkan usaha sanitasi, baik secara teknis dan non-teknis terutama untuk mengembangkan kapasitas/produksi, maupun untuk menjangkau aktor rantai pasok lain seperti toko bangunan. Pendampingan yang diberikan dapat berupa pelatihan pembangunan jamban dan cetakan jamban yang efektif, pendekatan pemasaran produk dan fasilitasi untuk *networking* kepada calon konsumen (nagari/kecamatan/kabupaten lain) dan partner (aktor rantai pasok lain: distributor/toko bangunan), pengetahuan tentang institusi finansial dan pembukuan yang sehat, dan perawatan produk. Selanjutnya pendampingan juga tidak terbatas pada pelatihan-pelatihan namun bisa juga dengan fasilitasi ruang/*platform* diskusi terbuka dan monitoring berkelanjutan.

Tabel 12 Contoh skema kredit sanitasi untuk paket pembayaran selama 26 minggu dengan plafon Rp1.000.000-Rp.5.000.000,00 (Sumber: Komida)

Paket: 26 Minggu		Minggu ke 2 - 25 Mg			Minggu terakhir (Mg 26)		
Pembiayaan	Margin	Pokok	Margin	Total	Pokok	Margin	Total
1.000.000	110.000	40.000	4.000	44.000	40.000	14.000	54.000
1.250.000	137.500	50.000	5.500	55.500	50.000	5.500	55.500
1.500.000	165.000	60.000	6.500	66.500	60.000	9.000	69.000
1.750.000	192.500	70.000	7.500	77.500	70.000	12.500	82.500
2.000.000	220.000	80.000	8.500	88.500	80.000	16.000	96.000
2.250.000	247.500	90.000	9.500	99.500	90.000	19.500	109.500
2.500.000	275.000	100.000	11.000	111.000	100.000	11.000	111.000
2.750.000	302.600	110.000	12.000	122.000	110.000	14.500	124.500
3.000.000	330.000	120.000	13.000	133.000	120.000	18.000	138.000
3.250.000	357.500	130.000	14.000	144.000	130.000	21.500	151.500
3.500.000	385.000	140.000	15.000	155.000	140.000	25.000	165.000
3.750.000	412.500	150.000	16.500	166.500	150.000	16.500	180.000
4.000.000	440.000	160.000	17.500	166.500	160.000	20.000	195.500
4.250.000	467.500	170.000	18.500	188.600	170.000	23.500	207.500
4.500.000	395.000	180.000	19.500	199.500	180.000	27.000	207.000
4.750.000	522.500	190.000	20.500	210.500	190.000	30.500	220.500
5.000.000	550.000	208.000	22.500	230.500	8.000	10.000	18.000

Upaya pemicuan PHBS dan LBS yang digalakkan oleh pemerintah tetap terus dilakukan melalui Dinas terkait terutama sanitarian, bidan dan pendamping desa.

Bidan desa dan sanitarian yang ditemui mengakui bahwa pemicuan masih harus terus dilakukan namun sanitarian masih kurang. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah sanitarian dapat membina kader-kader khusus dari masyarakat untuk membantu kelancaran pemicuan. Sebagai wakil pemerintahan, nagari mengkoordinir semua kelembagaan sehingga pembentukan kader desa dapat terpantau dan sesuai dengan tujuan bersama dalam mengupayakan akses sanitasi bagi semua. Untuk itu, dibutuhkan upaya pelatihan yang berkelanjutan bagi sanitarian dan bidan sehingga terus melakukan pemicuan.

Pendampingan terhadap nagari melalui sanitarian juga agar dapat memastikan kegiatan pengadaan jamban menjadi prioritas utama nagari dalam pembangunan desa baik melalui kredit pinjaman pembangunan jamban maupun wirausaha sanitasi

Meningkatkan kerjasama pemerintah dengan lembaga keuangan mikro melalui MoU mengenai peningkatan bantuan modal terhadap wusan yang telah mendapatkan pelatihan.

Dinas terkait dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga keuangan dengan merekomendasikan jenis kredit mikro yang ditawarkan terutama untuk wirausaha sanitasi (wusan) yang sudah diberikan pelatihan. Dinas Kesehatan dapat merekomendasikan dan mendorong wirausaha sanitasi untuk mendapatkan pendampingan dari Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten. Dinas Kesehatan dapat menginisiasi adanya rapat koordinasi terkait akses kredit terhadap usaha sanitasi dengan bank daerah seperti BRI, BNI, BPR dan Bank Nagari juga lembaga kredit mikro. mengenai kerjasama terkait usaha sanitasi. Adapun keuntungan yang diperoleh bank adalah akses terhadap nasabah baru yang lebih mudah.

Selain itu, lembaga keuangan juga didorong dapat lebih mengutamakan calon nasabah yang mengajukan pinjaman untuk usaha konstruksi atau pemasok skala nagari. Ini berkaitan dengan kriteria atau prasyarat dalam menerima aplikasi kredit dari UMKM, misalnya dengan mengutamakan kredit yang melayani usaha air minum dan sanitasi karena UMKM konstruksi secara tidak langsung biasanya melayani usaha sanitasi. Hal ini dapat meningkatkan kemauan dari usaha konstruksi untuk berbisnis juga di usaha sanitasi.

Meningkatkan kerja sama antar SKPD untuk mendukung pencapaian program sanitasi nasional 100% dengan menerapkan program bersama terkait.

Beberapa instansi pemerintah mengakui belum ada duduk bersama terkait program sanitasi terutama dengan pendekatan STBM. Namun demikian, instansi-instansi di luar Dinas Kesehatan yang ditemui dan terkait sanitasi seperti Dinas Koperasi dan Perdagangan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari terbuka untuk mengadakan kerjasama terkait percepatan program sanitasi 100%.

Wirausaha sanitasi (wusan) di Kabupaten Padang Pariaman masih belum optimal dalam produksi (cetakan kurang) dan pemasaran (usaha macet).

Studi awal dan evaluasi dalam mengetahui tantangan-tantangan yang dihadapi oleh wirausaha sanitasi di tiap daerah untuk mendapatkan fakta yang lebih akurat perlu dilakukan. Pendampingan terutama untuk wusan yang masih belum optimal melakukan kegiatan pemasaran dapat dilakukan dengan:

- *Workshop* dan pelatihan untuk meningkatkan motivasi berbisnis sanitasi. Selain *workshop* pembuatan toilet, baiknya dilakukan penyuluhan dengan modul sanitasi sebagai bisnis

(pemahaman mengenai sanitasi saat ini, kebutuhan masyarakat, aktor terlibat dalam sanitasi, akses modal dan program kerja sama pemerintah di bidang sanitasi, promosi dan pemasaran). Strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh wusan adalah pengenalan produk dalam kegiatan lingkup desa, wusan ikut terlibat dalam monitoring STBM yang dilakukan pemerintah ke desa dan mempromosikan usahanya.

- Untuk mengatasi kemacetan usaha sanitasi, wusan perlu dibantu untuk akses modal yang lebih luas dengan kemudahan persyaratan. Selain itu wusan juga perlu dikenalkan dengan manajemen usaha dan keuangan.
- Meningkatkan peran perempuan dalam promosi sanitasi. Biasanya promosi hidup sehat dilakukan oleh bidan dan sanitarian melalui pertemuan posyandu dan pertemuan ibu-ibu. Untuk itu akan lebih baik dalam promosi usaha sanitasi, perempuan dilibatkan.
- Promosi dapat dilakukan dengan membuat brosur dan poster usaha yang dapat disebarluaskan dan ditempelkan pada kantor desa.
- Promosi dari mulut ke mulut juga penting dalam mendapatkan konsumen. Pemilik usaha dapat meminta pelanggan untuk merekomendasikan produk kepada calon konsumen lain.

Meningkatkan aksesibilitas produk-produk lokal dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha yang bergerak di bidang sanitasi

Guna memenuhi permintaan akan pembangunan jamban, perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas usaha wusan maupun usaha sanitasi lainnya. Beberapa hal yang dapat dilakukan:

- a. Meningkatkan jumlah wusan yang mencukupi: Guna memastikan kualitas dan pasokan bahan-bahan bangunan yang cukup, sumber daya dan kapasitas wusan perlu ditingkatkan. Jumlah wusan yang cukup bersifat penting untuk mencegah kekurangan pasokan barang. Apabila pasokan dan kualitas produksi lokal mencukupi, pengadaan bahan-bahan bangunan tidak perlu mengandalkan pengiriman dari luar daerah seperti pulau Jawa. Adanya pasokan barang secara lokal juga berpotensi menurunkan harga bahan yang dapat ditawarkan. Pendampingan dan pemantauan akan wusan perlu dilakukan. Jumlah wusan dapat ditingkatkan dengan sosialisasi ajakan berwirausaha sanitasi. Ajakan dapat dilakukan oleh pihak pemerintah bersama dengan nagari dengan jaminan pendampingan dan kemudahan akses modal melalui BUM Nag.
- b. Meningkatkan jumlah toko bangunan dengan usaha sanitasi sebagai sampingan: Toko-toko bangunan pada umumnya memiliki jaringan untuk pengadaan material bangunan serta jasa tukang. Apabila ada wirausaha pembangunan jamban yang juga memiliki toko bangunan, dalam pengadaan bahan harga-harga bahan bangunan dapat ditekan. Mereka cenderung punya modal awal yang baik untuk membuat usaha sanitasi sebagai usaha sampingan. Adanya konsep ini perlu ditawarkan langsung kepada toko-toko bangunan. Selain itu, perlu ada pendampingan, kemudahan mendirikan usaha, kemudahan akses kepada konsumen potensial maupun insentif lainnya, sehingga pengusaha toko bangunan memiliki keinginan untuk mendirikan usaha sanitasi.
- c. Menghubungkan wusan ke toko bangunan: Untuk usaha-usaha (terutama skala kecil) yang hanya memiliki usaha sanitasi dan belum memiliki jaringan yang luas, perlu diadakan hubungan atau rekanan antara wusan dan toko bangunan. Dengan demikian, wusan skala kecil dapat berkembang karena adanya permintaan dari toko bangunan yang cenderung lebih stabil daripada permintaan dari masyarakat. Toko-toko bangunan juga dapat diuntungkan dengan wusan lokal karena mereka bisa mendapatkan segmen barang yang lebih murah dan terjangkau untuk masyarakat serta barang lebih cepat, dan tidak harus mengandalkan pengiriman dari luar daerah sehingga pasokan bisa lebih terjamin. Toko juga dapat menjangkau konsumen lebih luas. Perlu dilakukan pendataan dan pendekatan pada toko bangunan dan wusan oleh tim khusus yang terdiri dari wusan, kader nagari, pendamping desa dan sanitarian.



Annex

- **Diskusi Kelompok (Focus Group Discussion/FGD)**

17 Warga Masyarakat Nagari Pauh Kamar Kecamatan Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman

- a. 7 Warga Masyarakat Punya Jamban
- b. 10 Warga Masyarakat Tidak Punya Jamban

15 Warga Masyarakat Nagari Sikucua Barat Kecamatan Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman

- a. 14 Warga Masyarakat Punya Jamban
- b. 1 Warga Masyarakat Tidak Punya Jamban

16 Warga Masyarakat Nagari Latang Kecamatan Lubuak Tarok Kab. Sijunjung

- a. 8 Warga Masyarakat Punya Jamban
- b. 8 Warga Masyarakat Tidak Punya Jamban

17 Warga Masyarakat Nagari Batu Manjulang Kecamatan Kupitan Kab. Sijunjung.

- a. 7 Warga Masyarakat Punya Jamban
- b. 10 Warga Masyarakat Tidak Punya Jamban

- **Tukang dan Toko Bangunan**

CV Pembangunan Jaya, Padang

Toko Bangunan Haji Linda, Nagari Limokoto, Kab. Sijunjung

Toko Bangunan Nagari Limomokoto Kab. Sijunjung

Toko Bangunan Nur Perabot, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kab. Padang Pariaman

Toko Besi Sumber Baru (Distributor), Padang

Toko Tiara Bangunan, Nagari Batu Manjulang, Kab. Sijunjung

Tukang Kab. Sijunjung & Kab. Padang Pariaman

- **Narasumber Institusi Pemerintahan**

Bidan Desa Nagari Pauh Kamar Kab. Padang Pariaman

Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman

Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Padang Pariaman

Sekretaris Nagari Sikucua Barat, Kecamatan Koto Kampung Dalam, Kab. Padang Pariaman

Bidan Desa Sikucua Barat Kab. Padang Pariaman

Dinas Penanaman Modal Kab. Padang Pariaman

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kab. Sijunjung

Dinas Kesehatan Kab Sijunjung

Wakil Sekretaris Nagari Latang, Kecamatan Lubuak Tarok Kab. Sijunjung

- **Institusi Keuangan**

Bank Pengkreditan Rakyat Cincin Andalas, Kab. Padang Pariaman

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Padang Pariaman

BUM Nag Parit Malintang, Kab. Padang Pariaman

Kredit Mikro Nagari Koto Baru, Kab. Sijunjung

Bank Nagari Kab. Sijunjung

Bank Rakyat Indonesia Kab Sijunjung

KMN Pematang Panjang Kab. Sijunjung



Disclaimer

Isi dari publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak sepenuhnya mencerminkan pandangan dari SNV Indonesia, ataupun Pemerintah Belanda. Walaupun semua usaha telah diambil untuk memastikan keakuratan materi yang dipublikasikan, SNV Indonesia dan penulis tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul dari setiap orang yang bertindak dan bergantung berdasarkan isi dokumen ini. Untuk mendapatkan izin untuk publikasi dapat menghubungi SNV Indonesia.



SNV is an international not-for-profit development organisation, working in Agriculture, Energy, and Water, Sanitation & Hygiene. Founded in the Netherlands in 1965, we have built a long term local presence in countries in Asia, Africa, and Latin America.

📍 Jl. Kemang Timur Raya No.66, Jakarta Selatan, Indonesia

☎ +6221 719 9900 🌐 www.snv.org 📱 @SNVIndonesia